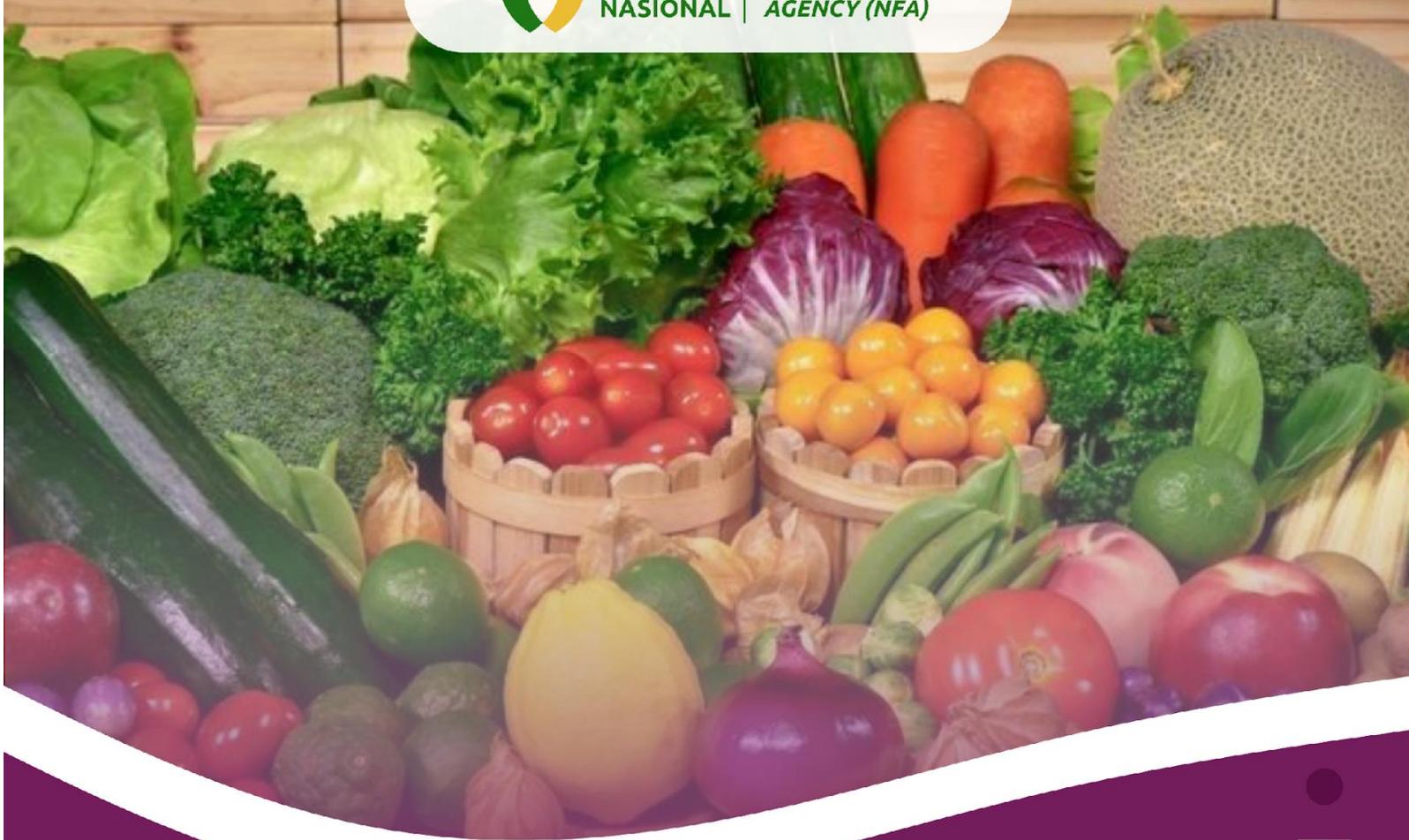




BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)



Laporan Bulanan

JUNI 2025

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi
dan Keamanan Pangan



Badan Pangan Nasional

KATA PENGANTAR

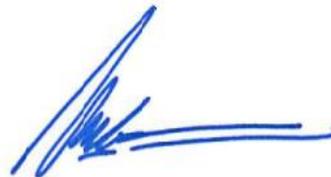
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya sehingga “Laporan Bulan Juni 2025 Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan” dapat diselesaikan.

Laporan ini berisikan program dan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2025 sebagai bentuk implementasi kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, karena itu saran untuk perbaikan pada periode berikutnya sangat diharapkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program kegiatan dan semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Jakarta, Juli 2025

Deputi Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan



Andriko Noto Susanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>I.1 Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>I.2 Tujuan.....</i>	<i>1</i>
<i>I.3 Metodologi Penyusunan Laporan.....</i>	<i>2</i>
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT.....	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
<i>III.1 Realisasi Fisik dan Keuangan.....</i>	<i>5</i>
<i>III.2 Monitoring Kegiatan Prioritas.....</i>	<i>10</i>
BAB IV PENUTUP.....	89
<i>IV.1 Kesimpulan.....</i>	<i>89</i>
<i>IV.2 Permasalahan.....</i>	<i>89</i>
<i>IV.3 Rekomendasi.....</i>	<i>89</i>
LAMPIRAN.....	90
<i>Lampiran 1 Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025.....</i>	<i>90</i>
<i>Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Januari Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.....</i>	<i>92</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan; 3) pemantapan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional. Berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 2 Desember 2024, Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.284.839.000,- (Empat Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Hasil pemantauan, evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Juni Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan posisi bulan Juni tahun 2025. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Juni Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bulan Juni tahun 2025 baik fisik maupun keuangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan posisi bulan Juni Tahun 2025.

2. Mengetahui realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Juni Tahun 2025.

1.3 Metodologi Penyusunan Laporan

- 1.2 Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
- 2.2 Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran program dan indikator kinerja Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Juni tahun 2025 dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai Lembar III DIPA Revisi ke-7 tanggal 18 Juni 2025. Pada dokumen tersebut, rencana penarikan pada bulan Juni 2025 ditargetkan sebesar 2,25%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Juni 2025
Deputi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Juni 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp) 2,25.%	Fisik
6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			38.519.972.000 12.333.462.000*		866.699.370 277.502.895*	
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000 679.000.000*	9 rekomendasi kebijakan	27.984.600 15.277.500*	0 rekomendasi kebijakan
AEA-Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000 1.635.382.000*	10 kegiatan	17.850.000 36.796.095* 176.850.000	1 Kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000 1.264.060.000.*	9 kegiatan	104.140.800 28.441.350*	0 Kegiatan
	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000 391.010.000*	3 Kegiatan	109.364.625 8.797.725*	0 Kegiatan
AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000 46.825.000 *	3 NSPK	13.500.000 1.053.563*	0 NSPK
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000 276.550.000*	5 NSPK	22.500.000 6.222.375*	0 NSPK
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000 211.400.000*	3 NSPK	6.750.000 4.756.500*	0 NSPK
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	2.000.000.000 1.176.595.000*	10 UMKM	45.000.000 26.473.388*	0 UMKM
PCA-Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	2.500.000.000 722.860.000*	500 Produk	56.250.000 16.264.350**	11 Produk

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Juni 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp) 2,25.%	Fisik
PEH-Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000 1.075.400.000*	1 Kegiatan	78.750.000 24.196.500*	1 Kegiatan
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000 60.100.000*	1 Lembaga	20.356.402 1.352.250*	0 Lembaga
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang Dibina	1.499.760.000 707.390.000*	22 lembaga 7 lembaga*	33.744.600 15.916.275*	0 Lembaga
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekeagaman pangan	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekeagaman pangan	684.460.000 116.250.000*	1 Kelompok Masyarakat	15.400.350 2.615.625*	0 Kelompok Masyarakat
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pangan Segar Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000 1.389.630.000*	1 Laporan	67.455.000 31.266.675*	0 Laporan
QMA-Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000 356.010.000 *	1 Data	33.750.000 8.010.225*	0 Data
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000 2.225.000.000*	4 Unit 2 Unit*	94.612.500 50.062.500*	0 Unit*

Catatan: * : Anggaran setelah dikurangi blokir (berdasarkan aplikasi SAKTI),
Realisasi fisik sesuai revisi anggaran

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun anggaran 2025, Nomor DIPA 125.01.1.690590/2025 tanggal 5 Desember 2024, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.40.284.839.000,-. Pada Bulan Januari 2025, terjadi revisi DIPA berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana efisiensi belanja Badan Pangan Nasional sebesar 60,16%. Menindaklanjuti efisiensi tersebut, dalam rangka mendukung capaian kinerja Program Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dapat dibelanjakan pada bulan Juni 2025 adalah sebesar Rp. 12.333.462.000,-. Namun pada bulan Juni 2025 pagu anggaran sebesar Rp. 40.284.839.000 direvisi menjadi Rp.38.519.972.000 (DIPA Revisi 7 tanggal 18 Juni 2025).

Realisasi keuangan pada bulan Juni Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana Tabel 2 berikut:

**Tabel 2 Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Juni Tahun 2025 per Output dan Komponen Lingkup
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (2,25.%)		Realisasi Bulan Juni 2025		Realisasi SP2D s.d Juni 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			866.699.370 277.502.895*		775.528.435		2.529.318.573	
ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	27.984.600 15.277.500*	0 rekomendasi kebijakan	128.100.05 7	1. rekomendasi kebijakan	155.057.446	
AEA- Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	176.850.000 36.796.095*	1 Kegiatan	209.586.35 6	1 Kegiatan	746.664.821	1 Kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	104.140.800 28.441.350*	0 kegiatan	53.854.285	0 kegiatan	420.076.302	0 kegiatan
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	109.364.625 8.797.725*	0 Kegiatan	27.979.086	0 kegiatan (1 Rapat)	117.359.492	0 kegiatan

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (2,25.%)		Realisasi Bulan Juni 2025		Realisasi SP2D s.d Juni 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	13.500.000 1.053.563*	0 NSPK	0	0 NSPK	46.619.345	3 NSPK
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	22.500.000 6.222.375*	0 NSPK	27.694.000	0 NSPK	34.994.000	0 NSPK
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	6.750.000 4.756.500*	0 NSPK	36.340.557	0 NSPK (1 rapat)	36.340.557	2 NSPK
BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Pengembangan Usaha Pangan Lokal	45.000.000 26.473.388*	0	17.621.860	0	19.111.860	0
PCA-Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Sertifikasi dan registrasi	56.250.000 16.264.350*	11 Produk	38.884.892	146 produk (1 Rapat)	158.300.784	1.019 produk
PEH-Promosi	Promosi Pangan B2SA	Promosi Pangan B2SA	78.750.000 24.196.500*	1 Kegiatan	21.864.570	1 Kegiatan	259.129.789	1 Kegiatan
QDB-Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Operasional pasar pangan segar aman Pusat	20.356.403 1.352.250*	0 Lembaga	0	0 Lembaga	12.490.106	2 Lembaga
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang Dibina	33.744.600 15.916.275*	0 lembaga	57.507.950	0 lembaga	166.992.480	7 Lembaga

Program/ Kegiatan/KRO/ RO/ Komponen			Target (2,25.%)		Realisasi Bulan Juni 2025		Realisasi SP2D s.d Juni 2025	
Program, Kegiatan & KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	15.400.350 2.615.625*	0 Kelompok Masyarakat	7.758.920	0	15.750.920	0
QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	67.455.000 31.266.675*	0 Laporan	138.213.402	(0 Laporan) 1 Rapat	330.308.171	0 Laporan
QMA-Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data Situasi Konsumsi Pangan	33.750.000 8.010.225*	0	10.122.500	0	10.122.500	0
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	94.612.500 50.062.500	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit

Catatan: * : Target realisasi berdasarkan anggaran setelah dikurangi blokir

Tabel 2 di atas menunjukkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bulan Juni 2025. Realisasi anggaran bulan Juni 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp. 775.528.435, sedangkan realisasi sampai dengan bulan Juni Rp. 2.529.318.573,- atau 20,51% berdasarkan pagu anggaran setelah diblokir atau sebesar 2,25% berdasarkan target realisasi bulan Juni 2025. Pada Bulan Juni 2025 kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan dan dalam proses realisasi. Realisasi anggaran per direktorat sampai dengan bulan Juni 2025 secara rinci sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Keuangan Direktorat Lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sampai dengan Bulan Juni 2025

Uraian	PAGU TA 2025 (Rp)		Realisasi bulan Juni 2025 (SP2D)			Sisa Anggaran (Rp)
	DIPA	Revisi	Rp	% DIPA	% Revisi	
HA.6877 Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	38.519.972.000	12.333.462.000	2.529.318.573	6,57%	20,51%	9.804.143.427
Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan	16.144.460.000	4.406.462.001	1.097.399.235	6.80%	24.90%	3.309.062.765
Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	8.372.000.000	2.927.000.000	777.120.228	9,28%	26,55%	2.149.879.772
Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	14.003.512.000	5.000.000.000	654.799.110	4.67%	13.10%	4.345.200.890

Sumber: Data SAKTI Kementerian Keuangan

Tabel 3 di atas menunjukkan realisasi keuangan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sampai dengan bulan Juni 2025 mencapai 6,57% berdasarkan Pagu Dipa Revisi 7 Tanggal 18 Juni 2025 atau sebesar 20,51% berdasarkan Pagu Blokir.

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama bulan Januari Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

A. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1. Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan, tanggal 11 Juni 2025

Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan Tahun 2025 tingkat provinsi dan kabupaten/kota Se-Indonesia diselenggarakan secara daring pada Rabu, 11 Juni 2025. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam menganalisis data konsumsi pangan dan menyusun perencanaan pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH).

Bimtek dibuka oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, didampingi Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Bimtek diikuti lebih dari 700 peserta dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia secara daring.

Pemaparan Materi oleh Narasumber :

- 1) Ir. Yayat Heryarno, MPS (IPB University) menyampaikan pentingnya menetapkan target konsumsi pangan berbasis PPH sebagai ukuran kuantitatif yang realistis dan terukur. Penetapan target harus mempertimbangkan situasi konsumsi pangan saat ini, tren, kebijakan nasional/regional, dan karakteristik wilayah.
- 2) Prof. Dr. Drajat Martianto, Pakar dari IPB University, menyampaikan pentingnya perencanaan pangan daerah berbasis data PPH dan konsumsi pangan B2SA. Peningkatan skor PPH menekankan pentingnya perbaikan terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan wilayah tertinggal.

Tindak lanjut Bimtek :

- 1) Daerah agar menyusun target konsumsi pangan berbasis skor PPH dengan mempertimbangkan data baseline terkini dan karakteristik wilayah.
- 2) Melakukan evaluasi capaian konsumsi pangan dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan program.
- 3) Meningkatkan edukasi dan intervensi multisektor khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan keragaman dan kecukupan gizi pangan.
- 4) Memanfaatkan data terpusat dari BPS secara optimal dan menghindari perbedaan data yang dapat menghambat analisis kebijakan.



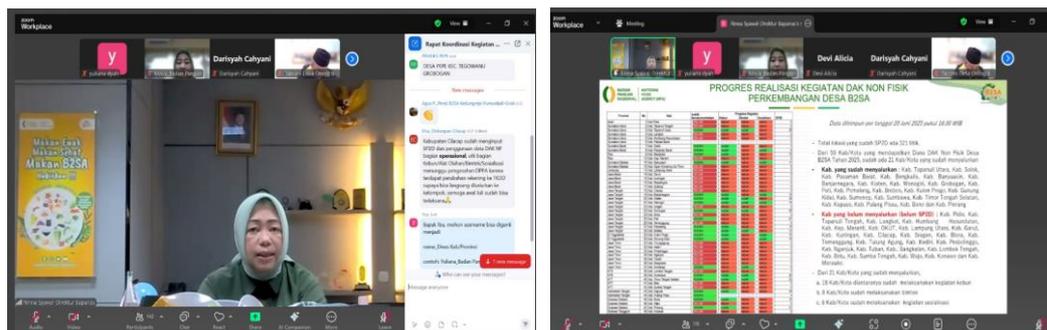
2. Rapat Koordinasi Kegiatan DAK Nonfisik Pengembangan Desa B2SA Tahun Anggaran 2025

- Total Desa yang memperoleh dana DAK Non Fisik adalah 809 lokasi yang tersebar 50 Kabupaten;
- Tidak ada penambahan dan perubahan desa dengan alasan apapun. Jika terdapat desa yang tidak bisa melaksanakan dengan alasan tertentu bisa bersurat ke Bapanas dan ditembuskan ke Kemenkeu serta Bappenas;
- Total lokasi yang sudah terbit SP2D sebanyak 321 titik lokasi atau desa yang tersebar di 21 Kabupaten dari 50 Kabupaten yang memperoleh kegiatan DAK Non Fisik;

- Pelaksanaan kegiatan di Daerah harus mengacu pada Perbadan No. 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- 18 kabupaten/kota sudah melaksanakan kegiatan kebun, 8 kabupaten/kota sudah melaksanakan bimtek, 6 kabupaten/kota sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi;
- Pada kegiatan Sosialisasi DAK Non Fisik Pengembangan Desa B2SA diharapkan peserta yang hadir berbeda setiap pelaksanaan kegiatan;
- Kabupaten yang memperoleh kegiatan ini harus menginput dokumen kegiatan yang terdapat di aplikasi Input laporan di E-Sakip untuk memudahkan Pusat dalam pemeriksaan kegiatan yang dilakukan oleh Daerah;
- Laporan dari daerah menjadi evaluasi penyempurnaan konsep B2SA dan dasar pengalokasian dana di tahun berikutnya;
- Terdapat 35 Kabupaten yang sudah menginput data desa (nama kelompok dan jumlah awal anggota) pada aplikasi E Sakip;
- Sedangkan untuk dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebanyak 13 Kabupaten;
- Penyusunan RPD kegiatan DAK Non Fisik Pengembangan Desa B2SA difokuskan untuk mengidentifikasi sumber pangan lokal di daerah setempat;
- Penginputan RPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bagaimana dana dimanfaatkan oleh kelompok penerima manfaat;
- Dalam pelaksanaannya apabila ada belanja barang yang tidak sesuai oleh RPD awal yang diinput dalam aplikasi Krisna maka dinas yang menangani urusan pangan Kabupaten dan pendamping perlu mendokumentasikan bukti pembelian barang berupa nota-nota pembelian dan dokumentasi barang yang dibelanjakan sesuai nota yang disampaikan, sehingga jika nanti diakhir tidak diperkenankan untuk revisi RPD daerah sudah memiliki bukti penggunaan dana sesuai dengan kondisi di lapangan;

- Jika terdapat Sisa Penggunaan Dana Daerah bersurat ke Badan Pangan Nasional dengan tebusan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Badan Perencanaan Nasional (Bapenas);
- Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pencairan Tahap I dapat disampaikan ke Badan Pangan Nasional selambat-lambatnya pada Bulan Agustus 2025, untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian dapat dilaksanakan pencairan Tahap II. Sedangkan, Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pencairan Tahap II dapat disampaikan ke Badan Pangan Nasional selambat-lambatnya pada awal Bulan Oktober 2025;
- Pada pelaporan Triwulan I di aplikasi E Sakip jika Kabupaten belum melakukan kegiatan sesuai dengan Komponen DAK Non Fisik Pengembangan Desa B2SA dapat mengupload berkas pendukung kegiatan CPCL Penerima Manfaat DAK Non Fisik Pengembangan Desa B2SA;
- Jika ada Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan kegiatan maka akan diberikan konsekuensi berupa tidak dapat memperoleh dana kegiatan di tahun selanjutnya;
- Rapat koordinasi akan dilakukan sebulan sekali untuk melihat progress bagaimana kegiatan Desa B2SA dengan penggunaan anggaran DAK non fisik sekaligus mengawal dan melaporkan kinerja kegiatan Desa B2SA ke dalam aplikasi E-Sakip;
- Secara reguler akan dilaksanakan pertemuan untuk dijadikan forum komunikasi dan koordinasi dalam memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan Desa B2SA yang difasilitasi dengan DAK Nonfisik;
- Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten yang belum mencairkan dana kegiatan kepada penerima manfaat dikarenakan:
 - a. Masih menunggu Kepala Dinas untuk menerbitkan SK Hibah Kelompok.
 - b. Masih adanya perubahan Kepala Daerah di daerah sehingga perlu menunggu surat Penetapan Kepala Daerah.

- c. Masih adanya proses pergantian Kepala Desa di beberap daerah sehingga berimbas kepada perubahan ketua kelompok dan SK Penetapan Kelompok.
 - d. Masih ada beberapa Kepala Daerah yang mengikuti kegiatan Retret yang dilakukan oleh Kemendagri.
 - e. Masih ada beberapa lokasi yang menunggu perubahan jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Dana Hibah ke Dana Bansos.
 - f. Masih adanya perbedaan persepsi pencairan dana kegiatan DAK Non Fisik di beberapa daerah. Misal terkait pelaksanaan kegiatan ada daerah yang mengira kegiatan yang dilakukan harus menggunakan Swakelola Tipe IV karena melibatkan Organisasi Masyarakat dalam hal ini kelompok penerima manfaat di desa.
- Kemudian akan dibuatkan Surat Percepatan Kegiatan DAK Non Fisik Pengembangan Desa B2SA serta akan ada kegiatan pertemuan kepada pendamping Desa agar peran pendamping dapat optimal.



3. Melakukan Monev Program Rumah Pangan B2SA dan PUPPL Provinsi Sulawesi Selatan, 3-5 Juni 2025

- **Sosialisasi Rumah Pangan Kab. Jeneponto**

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Desa Bungeng, Kec. Batang, Kab. Jeneponto pada tanggal 3 Juni 2025. Sosialisasi dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jeneponto, Tim Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Desa Bungeng, Tim PKK dan warga Desa Bungeng. Desa Bungeng terletak di daerah pesisir, sehingga ikan dan rumput laut mudah dan melimpah didapatkan. Sosialisasi konsumsi

pangan B2SA direncanakan dilaksanakan 3 kali dan bimtek pengolahan pangan akan berfokus pada pengolahan nugget ikan. Pengolahan Nugget ikan diharapkan dapat meningkatkan umur simpan, nilai jual, dan memberikan dampak ekonomi pada warga. Selain itu, dengan bimtek pengolahan nugget ikan, menjadi inovasi cara pengolahan pangan baru pada ibu-ibu yang menyediakan makan bagi keluarga terkhusus anak2 yang kurang suka makan ikan.

- **Monev Rumah Pangan Lanjutan**

Kegiatan monev dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 di Desa Lonrong, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng. Monev diikuti oleh Tim Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Tim Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten serta Ketua dan anggota PKK Desa. Kegiatan Teras Pangan B2SA masih terlaksana dengan baik, saat monev lahan sedang ditanam jagung manis sebagai variasi penanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Sebelumnya kelompok PKK telah panen sayur seperti kangkung, bayam, cabe, kacang panjang, tomat dst yang kemudian dibagikan pada kelompok sasaran stunting dan anggota kelompok. Gerai Pangan B2SA masih berjalan cukup baik. Hasil dari Teras Pangan berupa sayuran dijual di Gerai Pangan. Rumah Pangan B2SA masih berjalan dengan menggunakan dana desa. Tahun 2025 dianggarkan total Rp 30 Juta, mekanisme pencairan dana dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. Bantuan yang diberikan yaitu 3 dus susu bubuk dan 3 krat telur dengan sasaran penerima manfaat total 32 anak risiko stunting. Pemberian bantuan pangan bergizi pada kelompok sasaran stunting dipantau langsung oleh Ketua PKK Kab. Bantaeng melalui rapat koordinasi setiap bulan.

- **Koordinasi Rumah Pangan Kab. Bulukumba**

Kab. Bulukumba menerima bantuan Rumah Pangan tahun 2025, dengan jumlah penerima manfaat 2 kelompok. Kegiatan koordinasi Rumah Pangan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025. Koordinasi diikuti oleh Kabid Konsumsi dan Distribusi Pangan DPKP Kab. Bulukumba dan tim beserta Tim Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Dinas konsultasi terkait

Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) dan pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA. Pangan lokal yg berpotensi untuk dikembangkan adalah jagung pulut dan sorghum.

- **Koordinasi kegiatan PKP dengan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone**

Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025 di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone & Tim beserta Tim Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel. Bone merupakan lumbung padi, dalam setahun bisa menghasilkan 500 ribu ton beras, sedangkan konsumsi hanya 90 ribu ton sehingga selalu surplus. Selain beras, Bone juga penghasil sukun dan jagung kuning. Kadis Bone menyampaikan bahwa kegiatan Desa B2SA akan dikolaborasikan dengan ICRAF (*International Council for Research in Agroforestry*) terkait dengan edukasi pertanian pada masyarakat desa. Bone mendapatkan alokasi DAK untuk 17 Desa. Sukun Bone memiliki tekstur yang khas pulen dan berwarna kuning. Sukun menjadi pangan lokal sumber karbohidrat non nasi yang potensial. Tim DKP Kab. Bone menyampaikan bahwa setiap tahun melaksanakan survei langsung konsumsi pangan, ada perbedaan hasil hitung cukup besar antara survei langsung dan data susenas yg menjadi basis pengukuran PPH. Survei langsung menggunakan data konsumsi sedangkan susenas menggunakan data pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar warga Bone mengupayakan lahan yang dipunyai untuk pertanian, sehingga ada swasembada bahan pangan keluarga. Tim monev meninjau calon Lokasi DAK Non Fisik di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kab. Bone. Sudah disediakan lahan untuk kegiatan Kebun B2SA. Desa Usa memiliki potensi pangan lokal sukun, pisang kepok dan jagung kuning. Informasi dari Bendahara Keuangan Kab. Bone bahwa per tanggal 4 Juni 2025 sudah ada 5 kelompok yg SP2D dan siap melaksanakan kegiatan Desa B2SA.

- **Kunjungan ke UMKM BUMDES Temmappettue, Desa Teamalala, Sulawesi Selatan.**

Bumdes Temmappettue berada di Desa Teamalala, Kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Bumdes ini berdiri sejak tahun 2018. Produk yang dihasilkan berupa tepung Sukun, keripik sukun, keripik pisang, keripik singkong. Tahun 2024 Badan Pangan Nasional memberikan bantuan alat berupa mesin penepung, mesin pengiris, panci, kompor, pedal press, keranjang industri, set tray pengering sukun (nampan), dan *container box*. Bahan baku produksi didapat dari hasil produk pertanian masyarakat. Pemasaran produk dilakukan melalui penjualan di toko Bumdes, pesanan dinas dan pameran. Inovasi produksi yang dikembangkan setelah ada alat, diantaranya yaitu pembuatan bolu cukke dan brownies (bekerjasama dengan Fakultas. Pertanian Universitas Hasanuddin) dengan perbandingan tepung sagu dan terigu 3:1. Sejak bantuan alat diberikan, jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi meningkat hingga 150%. Semula sekali produksi hanya dapat mengolah 36kg sukun kini meningkat menjadi 90 kg sukun. Peningkatan produksi selaras dengan peningkatan omset penjualan per bulan. Omset meningkat dari 1.5jt/ bulan kini menjadi 10.5 jt/ bulan. Kendala yang dialami saat ini yaitu belum dapat memenuhi permintaan pasar terkait Tepung sukun yaitu karena keterbatasan kapasitas rumah pengering. sehingga hanya menerima maksimal 100 kg sukun/sekali produksi. Serta masih diprosesnya legalitas PIRT dan Halal untuk dipasarkan ke pasar yang lebih luas (e-commerce dan pasar swalayan). Rencana kedepan. Bumdes Temmappettue memiliki rencana untuk bekerjasama dengan perusahaan Brownies Amanda untuk menciptakan variasi bolu brownies dengan bahan tepung sukun khas Bone. Produk tepung sukun dari Bumdes Temmappettue berasal dari buah sukun Bone yang memiliki tekstur yang khas. Selain memiliki kualitas tepung yang baik, keunggulan tepung sukun Bumdes Temmappettue adalah memiliki harga yang paling murah jika dibandingkan dengan tepung sukun lainnya di e-commerce. Bumdes Temmappettue merupakan produsen tepung sukun satu-satunya di kab. Bone. Sehingga memiliki kesempatan besar untuk memaksimalkan pasar dan bersaing dengan produsen tepung sukun lainnya di sulsel dan

Indonesia. Harapan untuk pengembangan selanjutnya adalah *scale up* alat terutama oven pengering dan dapat ikut serta dalam pelatihan dan pameran yang diadakan oleh Badan Pangan Nasional.



4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa B2SA Tahun 2025 dan PUPL Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat; tanggal 12-14 Juni 2025

- a. Koordinasi dengan DKP Kab. Lombok Tengah perihal Pelaksanaan DAK Non Fisik Desa B2SA.

Alokasi DAK Non Fisik Desa B2SA Kab. Lombok Tengah sejumlah 11 lokasi. Pencairan anggaran masih proses penyelesaian dokumen dan diperkirakan akhir minggu ke 3 Juni pencairan tahap 1 dapat dilakukan. Kegiatan sosialisasi kepada aparat desa, penerima manfaat dan berbagai pihak sudah dilaksanakan. Rencana lahan yang digunakan untuk Teras B2SA bervariasi dari lahan desa/lahan pekarangan yang tidak jauh dari pemukiman sehingga mudah dikelola dan cukup luas. Diharapkan adanya kegiatan ini kelompok dapat bekerja sama dan berpartisipasi dalam Koperasi Merah Putih.

b. Monev PUPPL di Sasag Maiq, Kab. Lombok Barat

Komoditas yang diolah adalah pisang, jantung pisang, pelepah pisang, cabai dan rumput laut. Produk unggulan: kripik jantung pisang, abon jantung pisang, kripik rumput laut, keripik pelepah pisang, dodol pisang, cabe kering, dan stik cabe. Pemanfaatan bahan baku lokal tersebut cukup membantu masyarakat meningkatkan nilai jual bahan baku yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi. Dari semua bantuan alat, sebagian diserahkan kepada mitra/downline dengan usaha serupa. Sasak Maiq memiliki 4 mitra. Semua alat sudah diterima dan difungsikan dengan baik, tidak ada masalah dalam pengoperasiannya.

Fasilitasi bantuan alat yang diberikan kepada UD Sasag Maiq: mesin pemasak dan pengaduk, mesin grinder daging, dan mesin oven pengering, dan mesin pengaduk adonan. Untuk mitra/downline meliputi Ikhlas Management (mesin penepung, mesin mixer promax), KWT Kube Waroh (Mesin pemasak dan pengaduk, Cobtinius Band Sealer), KWT melati (Kulkas Freezer, Spinner, Blender Besar).

Terjadi peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi waktu untuk pengolahan yang berdampak pada peningkatan omset. Kapasitas produksi mencapai 500 pcs/hari. Peningkatan kapasitas produksi sebenarnya masih belum bisa memenuhi kecukupan permintaan pasar untuk wilayah NTB, luar provinsi dan ekspor (Malaysia, Singapura, dan Australia). Terkait kendala sarana pengeringan bahan baku karena masih tergantung panas matahari, dari Dinas Provinsi menyarankan membuat proposal ke Dinas Kab untuk memanfaatkan prasarana rumah bibit dari kegiatan P2L yang sudah tidak terpakai untuk membuat Dome.

c. Monev PUPPL di UD Ares, Kota Mataram

Komoditas yang diolah adalah rumput laut, ubi kayu dan ubi jalar ungu. Produk unggulan: Rengginang Ubi +Rumput Laut, Keripik Rumput laut, Kopi rumput laut. Fasilitasi yg diberikan kepada UD Ares dan 5 mitranya (UKM YDS, UKM Rihasa, UKM Pawon Nina, UKM Goal Gayong, UKM Dapur Tea) meliputi: Mesin Mixer, Wajan, Kulkas 2 pintu, Steamer 3 susun, kompor gas 2 tungku, timbangan kue, timbangan digital, kompor gas 1 tungku, noodle maker, timbangan analitis, sealer double, mesin

pemotong, blender. Semua alat dapat dioperasikan dengan baik dan memberikan dampak efisiensi waktu dan peningkatan kapasitas produksi. Omset mengalami peningkatan sebesar 10-15% dan jika ada event bisa sampai dengan 20%. Pemasaran dilakukan di toko oleh-oleh dalam kota. Produk-produk UD. Ares juga sudah memiliki perizinan. Inovasi produk kedepan membuat keripik dengan cetakan khusus dan cookies rumput laut. Saat ini belum terealisasi karena masih belum menemukan formula adonan yang tepat untuk dibuat peralatan yang disediakan.



B. Penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1. Mengikuti Seminar Arah Transformasi Sistem Pangan di RUU Pangan

Bincang Pangan Sehat Lestari seri-3 : "Seminar Arah Transformasi Sistem Pangan di RUU Pangan" diselenggarakan oleh Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) kolaborasi dengan Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, hari Selasa, 17 Juni 2024 bertempat di Hotel Sofyan Cut Mutia, Jakarta Pusat.

Seminar di buka oleh Ketua JP2GI dan Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dihadiri oleh perwakilan K/L (Bappenas, Kemenkes, Kementan, KKP, Bapanas, BGN), NGO dan Mitra, dan Dinas yang menangani Urusan Pangan tingkat Daerah. Tujuan seminar adalah mendapatkan masukan dari berbagai lintas sektor berkenaan dengan disusunnya RUU Pangan.

RUU Pangan tengah dimatangkan untuk merespons tantangan ketahanan

pangan akibat perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan peningkatan kebutuhan pangan nasional. DPR RI menyoroti perlunya perbaikan pasal substantif terkait kelembagaan pangan, penguatan penyuluh, digitalisasi pertanian, serta pengurangan food loss and waste. Koalisi Pangan Lestari menekankan pentingnya sistem pangan berbasis komunitas dan kearifan lokal, serta mendorong diversifikasi pangan dan konsumsi berkelanjutan. Saat ini, pangan lokal masih kurang terjangkau dan belum didukung kebijakan anggaran yang memadai. Bapanas mengharapkan RUU mengatur penganekaragaman pangan lokal, keamanan pangan, serta proteksi terhadap petani melalui pengaturan impor.

Diskusi menyimpulkan pentingnya transformasi sistem pangan dimulai dari level individu dan keluarga, dengan penguatan kelembagaan hingga masyarakat adat serta perlindungan bagi konsumen, produsen, dan UMKM. Tindak lanjut: Seluruh pihak diharapkan aktif mengawal RUU Pangan agar mampu mendorong sistem pangan nasional yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.



C. Pengembangan Usaha Pangan Lokal

1. Menjadi Penanggung pada Forum Diskusi Progres Hasil Studi Kebijakan Sistem Pangan Nasional Proyek FOLUR Mendukung RPJMN 2025–2029: Pengembangan Pangan Lokal

Badan Pangan Nasional menegaskan komitmennya untuk mendorong peran pangan lokal sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional. Forum diskusi Progres Hasil Studi Kebijakan Sistem Pangan Nasional Proyek FOLUR Mendukung RPJMN 2025–2029: Pengembangan Pangan Lokal yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dihadiri tim studi IPB, BRIN, Kementerian Pertanian, FAO, dan pemangku kepentingan lainnya pada tanggal 3 Juni 2025. Tujuan FGD adalah mendapatkan masukan terhadap kajian lokalikasi sistem pangan untuk komoditas Jagung, Ubi Jalar, dan Kentang.

Direktur Penganeekaragaman Konsumsi Pangan, menyampaikan pentingnya menggantikan dominasi konsumsi beras dengan sumber karbohidrat lokal seperti umbi-umbian dan sagu. Data menunjukkan konsumsi beras masih jauh lebih tinggi dibandingkan sumber karbohidrat lain. Ini mencerminkan tantangan besar dalam mengubah pola konsumsi masyarakat. Saat ini konsumsi beras nasional mencapai 92,1 kg per kapita per tahun, sementara umbi-umbian yang terdiri dari singkong, ubi jalar, kentang, sagu dan umbi lainnya hanya sekitar 15,01 kg per kapita per tahun. Perubahan pola konsumsi bukan hanya soal ketersediaan, tapi mindset masyarakat yang harus diubah bahwa kenyang itu hanya bisa dengan nasi. Indonesia punya kekayaan pangan luar biasa yang harus dibanggakan dan menjadikannya bagian utama dari sistem pangan nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025, Pangan lokal juga sudah mendapat perhatian strategis yang lebih besar dibanding periode sebelumnya. Terkait dengan capaian sasaran Penganeekaragaman Konsumsi Pangan, saat ini terdapat indikator konsumsi umbi-umbian dalam kerangka swasembada dan kemandirian pangan.

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, menekankan pentingnya keberlanjutan ekonomi dalam penyediaan pangan lokal. Kawasan produksi yang berkelanjutan dan terintegrasi diperlukan agar produksi pangan lokal bisa memenuhi skala industri. Selain itu pentingnya edukasi konsumsi

pangan lokal sejak dini melalui kurikulum pendidikan. Prof. Bustanul Arifin selaku pakar Ekonomi juga menambahkan potensi pangan lokal sebagai sebagai pangan fungsional yang memberikan peluang besar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik bagi kelompok rentan seperti lansia dan kelompok aktif seperti atlet.



2. Melakukan Monev Program Rumah Pangan dan PUPPL di Provinsi Kalimantan Tengah; tanggal 12-14 Juni 2025

- **Laporan Kegiatan**

- 1) Monev PUPPL UMKM HUMA FAJ Kabupaten Kapuas

UMKM Huma FAJ merupakan penerima bantuan peralatan pengolahan pangan lokal yang mengolah bahan baku Rosella, Kelor, dan Bunga Telang menjadi produk teh celup, teh tubruk, selai, dan campuran stik ketan.

Produk inovatif baru yang mulai dikembangkan adalah selai terong asam khas Kalimantan dan sirup dari buah terong asam dan produk lain yang akan dikembangkan kripik cempedak dan marning jagung.

Oven blower telah digunakan secara optimal untuk mengeringkan bahan baku sehingga meningkatkan mutu dan kapasitas produksi, sekaligus menaikkan omzet. Sebelumnya, proses pengeringan dilakukan secara manual dan hasilnya kurang optimal.

Vacuum fryer belum digunakan secara maksimal. Saat ini telah dilakukan uji coba (trial) awal untuk membuat kripik cempedak. *Dough mixer* dan *dough sheeter* belum pernah digunakan. Tim mendorong pemanfaatan *dough sheeter* untuk membuat produk marning jagung dengan cara dipipihkan agar proses produksi lebih

efisien, bahkan dapat dikembangkan menjadi produk seperti *tortilla chips*. *Spinner* belum maksimal dimanfaatkan karena hanya sebatas untuk menitiskan stik ketan serta produk inovasi berupa produk keripik buah cempedak belum berjalan.

Produk UMKM ini telah dipasarkan melalui jaringan Hypermart dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Kegiatan monev juga dihadiri oleh Bupati Pulang Pisau, yang menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas bantuan yang telah diberikan dan berharap lebih banyak UMKM lokal dapat difasilitasi ke depannya.

Pada kesempatan ini juga Bupati dan Perwakilan Badan Pangan, Dinas Ketahanan Provinsi Kalimantan Tengah serta Kab. Kapuas memberikan Sertifikat Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Tahun 2024.

2) Monev Kegiatan Pengembangan Desa B2SA di Desa Bakungin Kabupaten Kapuas

Kegiatan Pengembangan Desa B2SA di desa Bakungin dilanjutkan dengan menggunakan dana APBDesa.

a. Rumah Pangan

Kegiatan Rumah Pangan berupa pemberian makan menu B2SA, frekuensi pemberian dilakukan sebanyak 3 kali/minggu kepada 14 orang ibu hamil, 30 orang ibu menyusui dan 60 anak gizi kurang.

b. Teras Pangan

Kegiatan di Teras Pangan berupa penanam benih mentimun, kacang panjang, cabai serta memelihara bebek dan ayam.

c. Gerai Pangan

Gerai pangan di Desa Bakungin sudah jarang berfungsi akibat keterbatasan modal dan terhambatnya arus kas (*cash flow*) karena utang piutang sembako oleh warga sekitar. Saat ini, gerai hanya aktif bila ada panen berlebih dari Teras Pangan.

3) Monev Kegiatan DAK Non-Fisik Pengembangan Desa B2SA – Desa Mentangai Kabupaten Kapuas

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tahap pertama mengenai Sosialisasi Konsep Pangan B2SA serta demo memasak

Sayur Asam khas Kalimantan Tengah. Kegiatan Bimtek ini akan dilakukan sebanyak 20 kali.

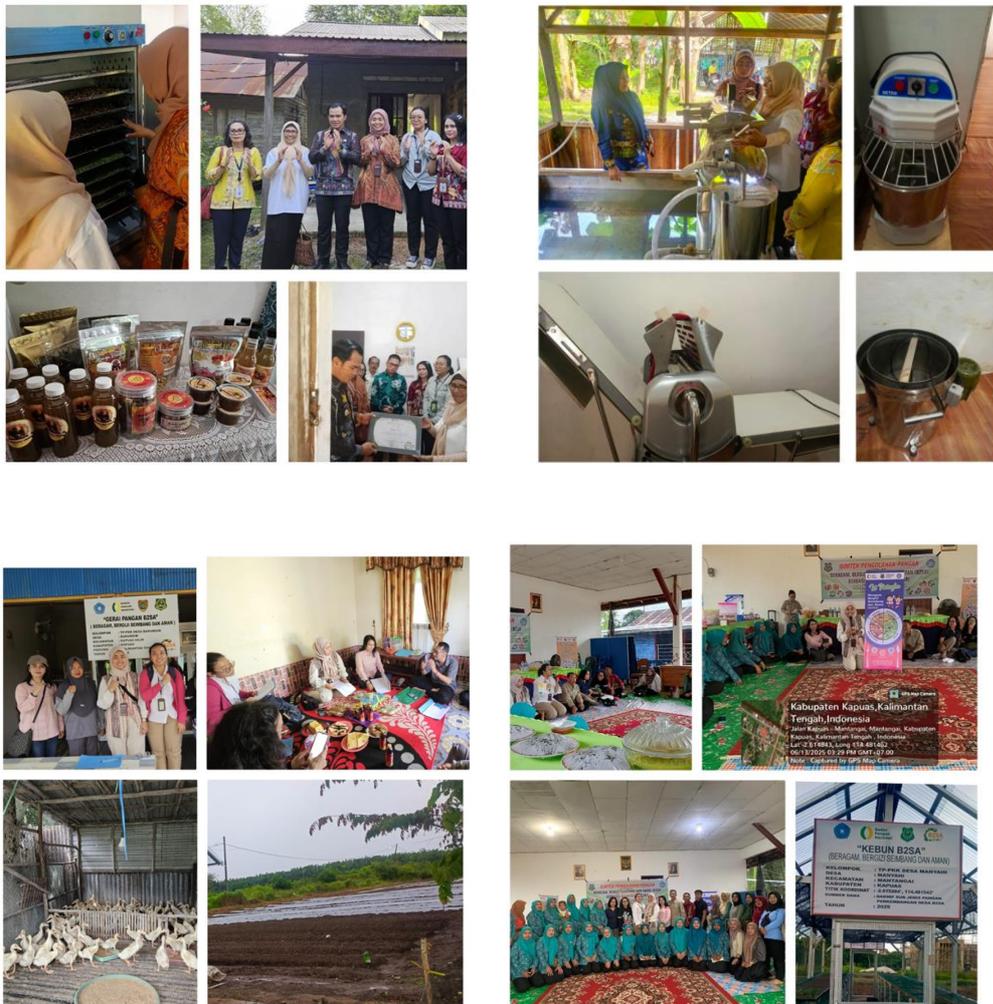
Dalam bimtek perdana ini masih terdapat miskonsepsi dari pendamping terkait konsep Bimtek. Pendamping Kelompok Desa masih mengartikan bimtek hanya sebagai demo masak yang penting memenuhi unsur kaidah B2SA, padahal semestinya bimtek dapat dijadikan wadah untuk sosialisasi dan edukasi pola konsumsi B2SA, keamanan pangan serta pengolahan pangan lokal sebagai strategi peningkatan nilai jual produk pangan lokal setempat.

Kegiatan Kebun B2SA di desa ini sudah mulai berjalan dan telah mulai ditanami benih cabai, kangkung dan bayam.

- **Kesimpulan dan Rekomendasi**

1. UMKM Huma FAJ menunjukkan progres positif dalam pemanfaatan alat bantu oven blower. Perlu didorong pemanfaatan alat lain seperti dough mixer, dough sheeter, dan spinner untuk diversifikasi produk dan efisiensi produksi.
2. Gerai pangan di Desa Bakungin perlu pendampingan khusus terkait manajemen keuangan dan pembentukan koperasi atau skema pengelolaan dana bergulir agar usaha bisa berkelanjutan.
3. Perlu penguatan pemahaman kepada Daerah terutama Pendamping Desa pelaksana Kegiatan DAK Non Fisik Pengembangan Desa B2SA terutama pada komponen Bimtek. Bentuk kegiatan bimtek bukan hanya sekedar mengolah makanan sesuai konsep B2SA namun juga ada materi bimtek terkait penyusunan menu sesuai Kaidah B2SA, keamanan pangan dan cara pengolahan pangan lokal sesuai dengan kearifan pangan lokal setempat sehingga dapat meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam mengolah pangan.
4. Perlu identifikasi dan pemetaan UMKM potensial lainnya untuk fasilitasi bantuan ke depan, sesuai harapan pemerintah daerah.

• **Dokumentasi Kegiatan**



3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa B2SA Tahun 2025 dan PUPL Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat; tanggal 12-14 Juni 2025

1) Koordinasi dengan DKP Kab. Lombok Tengah perihal Pelaksanaan DAK Non Fisik Desa B2SA

Alokasi DAK Non Fisik Desa B2SA Kab. Lombok Tengah sejumlah 11 lokasi. Pencairan anggaran masih proses penyelesaian dokumen dan diperkirakan akhir minggu ke 3 Juni pencairan tahap 1 dapat dilakukan. Kegiatan sosialisasi kepada aparat desa, penerima manfaat dan berbagai pihak sudah dilaksanakan. Rencana lahan yang digunakan untuk Teras B2SA bervariasi dari lahan desa/lahan pekarangan yang tidak jauh dari pemukiman sehingga mudah dikelola dan cukup luas. Diharapkan adanya

kegiatan ini kelompok dapat bekerja sama dan berpartisipasi dalam Koperasi Merah Putih.

2) Monev PUPPL di Sasaq Maiq, Kab. Lombok Barat

Komoditas yang diolah adalah pisang, jantung pisang, pelepah pisang, cabai dan rumput laut. Produk unggulan: kripik jantung pisang, abon jantung pisang, kripik rumput laut, keripik pelepah pisang, dodol pisang, cabe kering, dan stik cabe. Pemanfaatan bahan baku lokal tersebut cukup membantu masyarakat meningkatkan nilai jual bahan baku yg sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi. Dari semua bantuan alat, sebagian diserahterimakan kepada mitra/downline dengan usaha serupa. Sasak Maiq memiliki 4 mitra. Semua alat sudah diterima dan difungsikan dengan baik, tidak ada masalah dalam pengoperasiannya.

Fasilitasi bantuan alat yang diberikan kepada UD Sasaq Maiq: mesin pemasak dan pengaduk, mesin grinder daging, dan mesin oven pengering, dan mesin pengaduk adonan. Untuk mitra/downline meliputi Ikhlas Management (mesin penepung, mesin mixer promax), KWT Kube Waroh (Mesin pemasak dan pengaduk, Cobtinus Band Sealer), KWT melati (Kulkas Freezer, Spinner, Blender Besar).

Terjadi peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi waktu untuk pengolahan yang berdampak pada peningkatan omset. Kapasitas produksi mencapai 500 pcs/hari. Peningkatan kapasitas produksi sebenarnya masih belum bisa memenuhi kecukupan permintaan pasar untuk wilayah NTB, luar provinsi dan ekspor (Malaysia, Singapura, dan Australia). Terkait kendala sarana pengeringan bahan baku karena masih tergantung panas matahari, dari Dinas Provinsi menyarankan membuat proposal ke Dinas Kab untuk memanfaatkan prasarana rumah bibit dari kegiatan P2L yang sudah tidak terpakai untuk membuat Dome.

3) Monev PUPPL di UD Ares, Kota Mataram

Komoditas yang diolah adalah rumput laut, ubi kayu dan ubi jalar ungu. Produk unggulan: Rengginang Ubi +Rumput Laut, Keripik Rumput laut, Kopi rumput laut. Fasilitasi yg diberikan kepada UD Ares dan 5 mitranya (UKM YDS, UKM Rihasa, UKM Pawon Nina, UKM Goal Gayong, UKM Dapur Tea) meliputi: Mesin Mixer, Wajan, Kulkas 2 pintu, Steamer 3

susun, kompor gas 2 tungku, timbangan kue, timbangan digital, kompor gas 1 tungku, noodle maker, timbangan analitis, sealer double, mesin pemotong, blender. Semua alat dapat dioperasikan dengan baik dan memberikan dampak efisiensi waktu dan peningkatan kapasitas produksi. Omset mengalami peningkatan sebesar 10-15% dan jika ada event bisa sampai dengan 20%. Pemasaran dilakukan di toko oleh-oleh dalam kota. Produk-produk UD. Ares juga sudah memiliki perizinan. Inovasi produk kedepan membuat keripik dengan cetakan khusus dan cookies rumput laut. Saat ini belum terealisasi karena masih belum menemukan formula adonan yang tepat untuk dibuat peralatan yang disediakan.



4. Melakukan Monev Program Rumah Pangan dan PUPPL di Provinsi Kalimantan Tengah; tanggal 12-14 Juni 2025

- **Laporan Kegiatan**

- 1) Monev PUPPL UMKM HUMA FAJ Kabupaten Kapuas

UMKM Huma FAJ merupakan penerima bantuan peralatan pengolahan pangan lokal yang mengolah bahan baku Rosella, Kelor, dan Bunga Telang menjadi produk teh celup, teh tubruk, selai, dan campuran stik ketan.

Produk inovatif baru yang mulai dikembangkan adalah selai terong asam khas Kalimantan dan sirup dari buah terong asam dan produk lain yang akan dikembangkan kripik cempedak dan marning jagung.

Oven blower telah digunakan secara optimal untuk mengeringkan bahan baku sehingga meningkatkan mutu dan kapasitas produksi, sekaligus menaikkan omzet. Sebelumnya, proses pengeringan dilakukan secara manual dan hasilnya kurang optimal.

Vacuum *fryer* belum digunakan secara maksimal. Saat ini telah dilakukan uji coba (trial) awal untuk membuat keripik cempedak. *Dough mixer* dan *dough sheeter* belum pernah digunakan. Tim mendorong pemanfaatan *dough sheeter* untuk membuat produk marning jagung dengan cara dipipihkan agar proses produksi lebih efisien, bahkan dapat dikembangkan menjadi produk seperti *tortilla chips*. *Spinner* belum maksimal dimanfaatkan karena hanya sebatas untuk menitikkan stik ketan serta produk inovasi berupa produk keripik buah cempedak belum berjalan.

Produk UMKM ini telah dipasarkan melalui jaringan Hypermart dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Kegiatan monev juga dihadiri oleh Bupati Pulang Pisau, yang menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas bantuan yang telah diberikan dan berharap lebih banyak UMKM lokal dapat difasilitasi ke depannya.

Pada kesempatan ini juga Bupati dan Perwakilan Badan Pangan, Dinas Ketahanan Provinsi Kalimantan Tengah serta Kab. Kapuas memberikan Sertifikat Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal Tahun 2024.

2) Monev Kegiatan Pengembangan Desa B2SA di Desa Bakungin Kabupaten Kapuas

Kegiatan Pengembangan Desa B2SA di desa Bakungin dilanjutkan dengan menggunakan dana APBDesa.

a. Rumah Pangan

Kegiatan Rumah Pangan berupa pemberian makan menu B2SA, frekuensi pemberian dilakukan sebanyak 3 kali/minggu kepada 14 orang ibu hamil, 30 orang ibu menyusui dan 60 anak gizi kurang.

b. Teras Pangan

Kegiatan di Teras Pangan berupa penanam benih mentimun, kacang panjang, cabai serta memelihara bebek dan ayam.

c. Gerai Pangan

Gerai pangan di Desa Bakungin sudah jarang berfungsi akibat keterbatasan modal dan terhambatnya arus kas (*cash flow*) karena utang piutang sembako oleh warga sekitar. Saat ini, gerai hanya aktif bila ada panen berlebih dari Teras Pangan.

3) Monev Kegiatan DAK Non-Fisik Pengembangan Desa B2SA – Desa Mentangai Kabupaten Kapuas

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tahap pertama mengenai Sosialisasi Konsep Pangan B2SA serta demo memasak Sayur Asam khas Kalimantan Tengah. Kegiatan Bimtek ini akan dilakukan sebanyak 20 kali.

Dalam bimtek perdana ini masih terdapat miskonsepsi dari pendamping terkait konsep Bimtek. Pendamping Kelompok Desa masih mengartikan bimtek hanya sebagai demo masak yang penting memenuhi unsur kaidah B2SA, padahal semestinya bimtek dapat dijadikan wadah untuk sosialisasi dan edukasi pola konsumsi B2SA, keamanan pangan serta pengolahan pangan lokal sebagai strategi peningkatan nilai jual produk pangan lokal setempat.

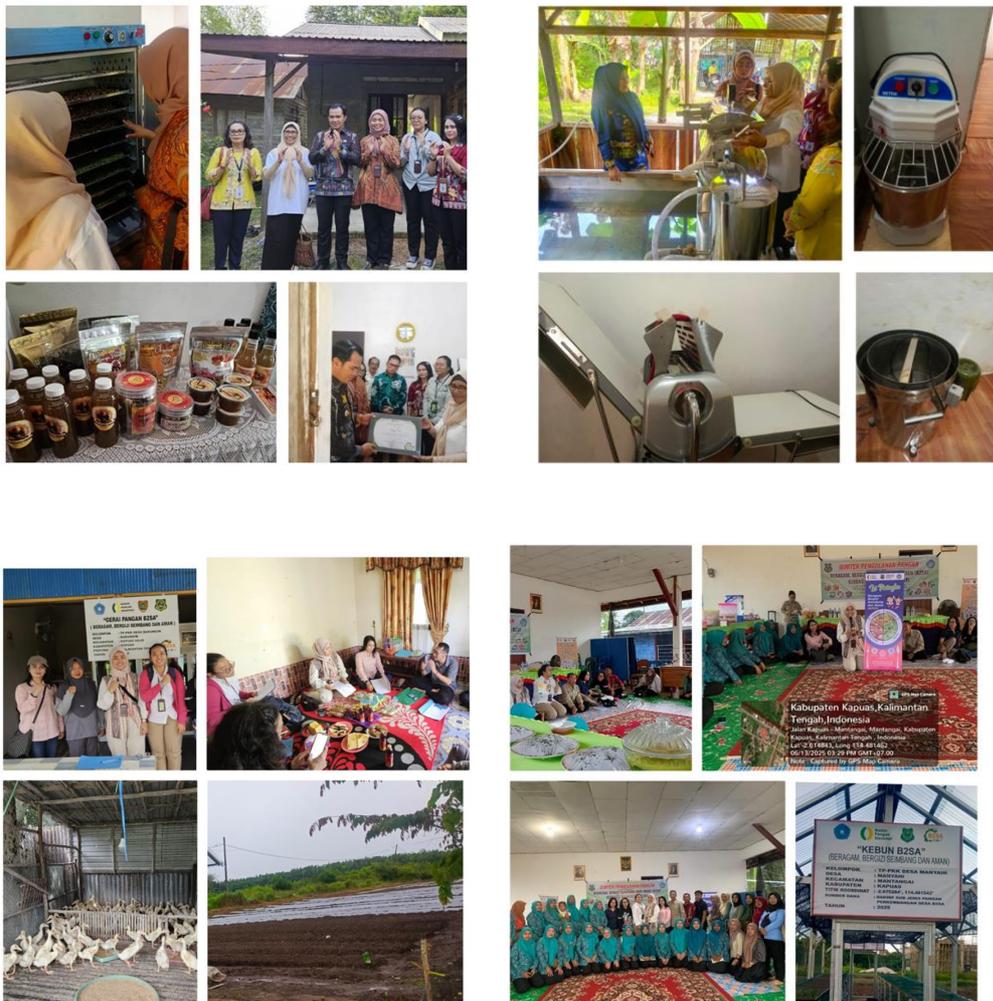
Kegiatan Kebun B2SA di desa ini sudah mulai berjalan dan telah mulai ditanami benih cabai, kangkung dan bayam.

- **Kesimpulan dan Rekomendasi**

1. UMKM Huma FAJ menunjukkan progres positif dalam pemanfaatan alat bantu oven blower. Perlu didorong pemanfaatan alat lain seperti dough mixer, dough sheeter, dan spinner untuk diversifikasi produk dan efisiensi produksi.

2. Gerai pangan di Desa Bakungin perlu pendampingan khusus terkait manajemen keuangan dan pembentukan koperasi atau skema pengelolaan dana bergulir agar usaha bisa berkelanjutan.
3. Perlu penguatan pemahaman kepada Daerah terutama Pendamping Desa pelaksana Kegiatan DAK Non Fisik Pengembangan Desa B2SA terutama pada komponen Bimtek. Bentuk kegiatan bimtek bukan hanya sekadar mengolah makanan sesuai konsep B2SA namun juga ada materi bimtek terkait penyusunan menu sesuai Kaidah B2SA, keamanan pangan dan cara pengolahan pangan lokal sesuai dengan kearifan pangan lokal setempat sehingga dapat meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam mengolah pangan.
4. Perlu identifikasi dan pemetaan UMKM potensial lainnya untuk fasilitasi bantuan ke depan, sesuai harapan pemerintah daerah.

• **Dokumentasi Kegiatan**



5. Melakukan Monev Program Rumah Pangan dan PUPPL di Provinsi Kalimantan Timur; tanggal 10-12 Juni 2025

- Monev kegiatan PUPPL di Kota Balikpapan
 1. Kegiatan PUPPL di Kota Balikpapan dengan memfasilitasi beberapa peralatan di UMKM BDS Snack dengan pemilik Ibu Sri Astuti Wijaya, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga efektif waktu produksi dilaksanakan tanggal 10 Juni 2025
 2. Tempat pengolahan berlokasi di Kawasan Sentra Industri Kecil Teritip dimana lokasi ini diperuntukan oleh Pemerintah kota Balikpapan untuk Kluster UMKM se Kota Balikpapan
 3. Peralatan yang diberikan adalah:
 - 2 buah Continous sealer (1 buah sdh digunakan dan 1 lagi belum dipergunakan)
 - 2 buah chiller, yang telah dipergunakan
 - 1 untuk menyimpan bahan makanan setengah jadi dan 1 untuk menyimpan/mendisplay makanan yang sdh jadi
 - 1 buah mesin pencetakan pempek dan bakso (bentuk bulat) 1 buah mesin pencampur bumbu pada produk amplang
 4. Bahan utama yang digunakan dalam UMKM ini adalah singkong. Perkembangannya, produk baru yang diciptakan oleh BDS Snack adalah nugget sayur, pempek kelor, kress singkong, siomay sayur, minuman nenas rumput laut, keripik pisang jahe, amplang rumput laut, amplang cumi, amplang udang
 5. Tenaga kerja sampai saat ini berjumlah 15 orang dengan upah harian
 6. Setiap harinya BDS snack rata rata menghabiskan 80 - 100 kg bahan baku daging ikan untuk dibuat aneka olahan, mulai pempek, amplang, nugget, dll
 7. Pemasaran dilakukan dengan mensuplai barang ke toko oleh oleh di sekitar Balikpapan dan Samarinda, penjualan online serta pesanan khusus
 8. Kondisi penjualan saat ini sedang menurun, diperkirakan sejak April 2025 kemarin, yang paling terdampak adalah toko oleh-oleh
 9. Kendala : Alat ada yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, dikarenakan:

- Alat yang diminta tidak sesuai. Misalnya, yang diminta sesuai kebutuhan vaccum sealer tetapi dibelikan continous sealer
 - Kondisi saat ini untuk penjualan oleh oleh sedang mengalami kelesuan, khususnya untuk produk kerupuk dan amplang, hal ini sudah diantisipasi untuk menjual secara online produk makanan frozen seperti pempek, siomay, dll
 - Masih dibutuhkan freezer untuk penyimpanan hasil produk beku untuk menjadi stok
- Kunjungan ke UMKM Fanny Labu di Kota Samarinda
1. Kegiatan PUPPL di kota Samarinda memfasilitasi beberapa peralatan di UMKM Fanny's Labu dengan pemilik Ibu Oktifani Puji Fitriani
 2. Peralatan yang diberikan adalah mixer spiral, freezer, proofer dan dough sheeter. (Dough sheeter belum digunakan)
 3. Bahan utama yang digunakan UMKM ini adalah labu kuning yang diperoleh dari petani sekitar
 4. Produk inovasi setelah adanya bantuan alat yaitu donat frozen, nugget ayam labu kuning, pastel frozen, flossroll frozen dan bolu gulung frozen
 5. Hasil produksi semakin meningkat dan pekerjaan lebih cepat dengan adanya bantuan alat. Omset meningkat sekitar 20% dikarenakan penjualan dan variasi produk semakin banyak
 6. Jumlah tenaga kerja sebanyak 14 orang dengan upah per bulan
 7. Kendala saat ini yaitu ada 1 alat yang belum bisa digunakan yaitu dough sheeter dikarenakan harus menggunakan listrik 3 pass
 8. Rencana kedepan yaitu dapat mencari tempat yang lebih besar lagi untuk produksi dan menggunakan listrik 3 pass sehingga semua alat dapat dimanfaatkan dengan baik

6. Melakukan Monev Program Rumah Pangan dan PUPPL di Provinsi Sulawesi Selatan; tanggal 4-6 Juni 2025

- Monev Rumah Pangan Lanjutan
Kegiatan monev dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025 di Desa Lonrong, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng. Monev diikuti oleh Tim Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Tim Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten serta Ketua

dan anggota PKK Desa. Kegiatan Teras Pangan B2SA masih terlaksana dengan baik, saat monev lahan sedang ditanam jagung manis sebagai variasi penanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Sebelumnya kelompok PKK telah panen sayur seperti kangkung, bayam, cabe, kacang panjang, tomat dst yang kemudian dibagikan pada kelompok sasaran stunting dan anggota kelompok. Gerai Pangan B2SA masih berjalan cukup baik. Hasil dari Teras Pangan berupa sayuran dijual di Gerai Pangan. Rumah Pangan B2SA masih berjalan dengan menggunakan dana desa. Tahun 2025 dianggarkan total Rp 30 Juta, mekanisme pencairan dana dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. Bantuan yang diberikan yaitu 3 dus susu bubuk dan 3 krat telur dengan sasaran penerima manfaat total 32 anak risiko stunting. Pemberian bantuan pangan bergizi pada kelompok sasaran stunting dipantau langsung oleh Ketua PKK Kab. Bantaeng melalui rapat koordinasi setiap bulan.

- **Koordinasi Rumah Pangan Kab. Bulukumba**

Kab. Bulukumba menerima bantuan Rumah Pangan tahun 2025, dengan jumlah penerima manfaat 2 kelompok. Kegiatan koordinasi Rumah Pangan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025. Koordinasi diikuti oleh Kabid Konsumsi dan Distribusi Pangan DPKP Kab. Bulukumba dan tim beserta Tim Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Dinas konsultasi terkait Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) dan pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA. Pangan lokal yg berpotensi untuk dikembangkan adalah jagung pulut dan sorghum.

- **Koordinasi kegiatan PKP dengan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone**

Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025 di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone, dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone & Tim beserta Tim Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel. Bone merupakan lumbung padi, dalam setahun bisa menghasilkan 500 ribu ton beras, sedangkan konsumsi hanya 90 ribu ton sehingga selalu surplus. Selain beras, Bone juga penghasil sukun dan jagung kuning. Kadis Bone menyampaikan bahwa kegiatan Desa B2SA akan

dikolaborasikan dengan ICRAF (*International Council for Research in Agroforestry*) terkait dengan edukasi pertanian pada masyarakat desa. Bone mendapatkan alokasi DAK untuk 17 Desa. Sukun Bone memiliki tekstur yang khas pulen dan berwarna kuning. Sukun menjadi pangan lokal sumber karbohidrat non nasi yang potensial. Tim DKP Kab. Bone menyampaikan bahwa setiap tahun melaksanakan survei langsung konsumsi pangan, ada perbedaan hasil hitung cukup besar antara survei langsung dan data susenas yg menjadi basis pengukuran PPH. Survei langsung menggunakan data konsumsi sedangkan susenas menggunakan data pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar warga Bone mengupayakan lahan yang dipunyai untuk pertanian, sehingga ada swasembada bahan pangan keluarga. Tim money meninjau calon Lokasi DAK Non Fisik di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kab. Bone. Sudah disediakan lahan untuk kegiatan Kebun B2SA. Desa Usa memiliki potensi pangan lokal sukun, pisang kepok dan jagung kuning. Informasi dari Bendahara Keuangan Kab. Bone bahwa per tanggal 4 Juni 2025 sudah ada 5 kelompok yg SP2D dan siap melaksanakan kegiatan Desa B2SA.

D. Promosi Pangan B2SA

Dalam upaya menanamkan pemahaman tentang pentingnya pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sejak dini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang bersinergi dengan Badan Pangan Nasional menggelar kegiatan edukatif B2SA di SDN Total Persada Kota Tangerang tanggal 12 Juni 2025. Sebanyak 250 peserta yang terdiri dari siswa, guru, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dan tim B2SA turut meramaikan kegiatan ini. Edukasi dikemas dengan pendekatan menyenangkan, dimulai dari makan bersama kudapan lokal seperti jagung dan ubi rebus. Upaya ini dilakukan agar mengenalkan bahwasanya “kenyang tidak harus nasi” dan bahwa pangan lokal bisa menjadi sumber gizi yang sehat dan bergizi. Acara berlanjut dengan sosialisasi interaktif melalui metode dongeng dan cerita anak yang dibawakan oleh Kak Ariyo, Co-Founder Yayasan TACITA & Festival Cerita Anak Tacita. Cerita yang disampaikan tak hanya menghibur, tetapi juga mengajak anak-anak

memahami manfaat pangan B2SA dengan cara yang mudah dicerna. Tak hanya itu, berbagai permainan edukatif (edugames) dan pembagian materi promosi turut membuat suasana semakin seru dan informatif. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional, Rinna Syawal, menjelaskan pentingnya edukasi pola makan sejak usia sekolah. “Anak-anak adalah agen perubahan masa depan. Ketika mereka memahami dan membiasakan diri mengonsumsi pangan lokal yang beragam dan bergizi, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat. lewat kegiatan ini kita membangun fondasi pola makan sehat yang berkelanjutan”. Kepala SDN Total Persada, Maesaroh, menyambut baik kegiatan ini “Kegiatan ini sangat bermanfaat karena anak-anak belajar sambil bermain. Mereka jadi tahu bahwa ada banyak pilihan makanan sehat selain nasi dan itu berasal dari sekitar mereka sendiri. Harapannya, mereka bisa menerapkan pola makan ini di rumah dan menularkannya kepada keluarga”



1. **BGTS (bersamaan dengan kegiatan WFSD 2025; 24 Juni 2025)**

Kegiatan B2SA Goes To School (BGTS) di SMPN 1 Megamendung dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan dihadiri oleh 800 siswa serta guru SMPN 1 Megamendung. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Bupati Bogor, Wakil Ketua DPRD Bogor, Deputi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kemenko Pangan, Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Kadis Ketahanan Pangan Kab. Bogor, Kapolsek Bogor. Kepala Badan

Pangan Nasional membuka kegiatan BGTS dilanjutkan dengan minum jus buah dan makan bersama. Edukasi pola konsumsi B2SA dilakukan dengan cara sosialisasi dengan menggunakan metode dongeng yang interaktif. Dongeng disampaikan oleh Kak Ansori seorang pendongeng nasional, pendiri serta ketua umum Kampung Dongeng Indonesia yang telah berpengalaman menyampaikan pentingnya konsumsi B2SA. Sebagai upaya promosi B2SA dan konsumsi sayur & buah, Badan Pangan Nasional turut membagikan mug dan jus buah. Selain dongeng, edukasi pola konsumsi B2SA juga berupa edugames dan pemberian materi promosi kepada peserta yang aktif. Melalui kegiatan BGTS ini diharapkan generasi muda akan semakin mengerti dan merubah pola konsumsinya menjadi konsumsi prinsip B2SA, agar dapat menghasilkan generasi emas.



E. Data Situasi Konsumsi Pangan

1. Koordinasi Penyiapan Skor PPH level Kecamatan/Desa pada FGD Penyiapan Data Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas –FSVA)

Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan bekerjasama dengan GAIN dan BPS sedang menyiapkan Data Indikator Peta FSVA dengan Small Area Estimation (SAE) Projection pada tanggal 30 Juni 2024 bertempat di Hotel Aloft Jakarta. FGD tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan atas pemodelan dan hasil analisis SAE Projection yang dilakukan oleh BPS terhadap 9 indikator FSVA, termasuk Skor PPH Konsumsi.

FGD dihadiri oleh Senior Policy Advisor GAIN (Aang Sutrisna), Amiek Chamami (BPS), Pakar Statistik IPB (Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, M.S., dan Prof. Dr. Anang Kurnia, S.Si., M.Si), Perwakilan Direktorat

Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan Bapanas (Dit 31 dan Pusdatin).

Poin-poin hasil paparan dan diskusi :

- a. GAIN mendukung Pemerintah Indonesia dalam transformasi sistem pangan, khususnya dalam penyediaan data rinci untuk perencanaan hingga tingkat kabupaten/kota yang membutuhkan data unit wilayah terkecil. Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia berakhir di September sampai dengan pembaruan MoU.
- b. Bapanas (Dit 21) sedang memutakhirkan 9 dari 12 indikator FSVA untuk analisis wilayah hingga level kecamatan/desa.
- c. BPS dengan dukungan pembiayaan GAIN menyusun 9 indikator (FSVA) sampai level kecamatan & desa menggunakan pendekatan Small Area Estimation (SAE) Projection menggunakan kombinasi Data Susenas (konsumsi pangan dan kalori sd level kabupaten/kota) dan Data Pendataan Keluarga (PK) (cakupan penuh hingga desa/kelurahan, tapi tidak punya ada konsumsi kalori).
- d. Hasil validasi statistik internal, konsistensi data PK, dan agregasi wilayah menunjukkan bahwa pemodelan dapat digunakan dan konsisten dengan data sumber utama, serta dapat diaplikasikan untuk estimasi hingga level kecamatan/desa.
- e. Salah satu indikator yang dihasilkan adalah Skor PPH sd level kecamatan/desa dan skor PPH level rumah tangga (by name by address). Skor PPH level kecamatan/desa tidak memuat data Konsumsi menurut kelompok pangan sehingga pola Konsumsi mengikuti data kab/kota.

Rencana Tindak lanjut :

- Perlu dilakukan ground check lapangan oleh pemilik indikator untuk verifikasi konteks lokal dan penyesuaian dengan kondisi wilayah (pola Konsumsi, budaya, akses pangan, geografis, dll).
- Urgensi dan pemanfaatan data Skor PPH tingkat kecamatan/desa sebagai basis data skala prioritas kegiatan oleh Direktorat pengampu indikator dan Pemerintah Daerah provinsi/Kab/Kota.

- Ke depan perlunya knowledge transfer dari BPS ke Direktorat pengampu Indikator disertai alokasi anggaran pengolahan data.

3.2.2 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

A. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan

1. Menghadiri Rapat Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (TBT) WTO oleh BSN

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) menghadiri Rapat komite nasional penanganan hambatan teknis perdagangan/*Technical Barriers to Trade* (TBT) *World Trade Organization* (WTO) oleh BSN secara daring pada 3 Juni 2025.



Rapat dibuka oleh perwakilan dari Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, serta dihadiri oleh perwakilan dari Setkab, Kemenko Perekonomian, Kemenlu, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Kemenkes, Kemenhut, BPJPH, BPOM, Barantin, Bapanas, dan Asosiasi. Tujuan rapat ini adalah untuk menyusun strategi posisi Indonesia terkait isu ofensif maupun defensif melalui penyampaian *Specific Trade Concerns* (STCs) pada *The 96th Formal Meeting of The Committee on Technical Barriers to Trade* yang akan dilaksanakan pada 24 – 27 Juni 2025.

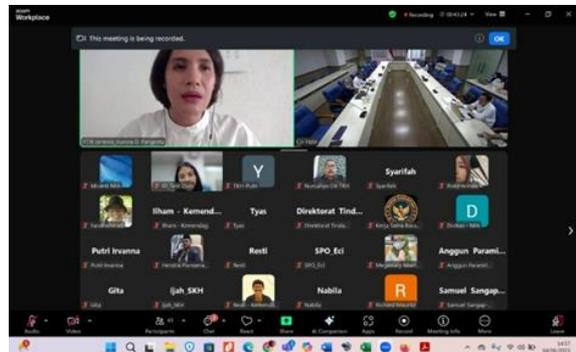
Adapun yang dimaksud isu ofensif pada rapat ini adalah isu yang diajukan secara aktif oleh suatu negara anggota untuk mempertanyakan, menentang, atau menyoroiti kebijakan teknis negara lain yang dianggap bisa menghambat perdagangan. Sedangkan isu defensif adalah isu yang menyangkut kebijakan teknis milik suatu negara yang dipertanyakan atau dikritik oleh negara lain dalam forum TBT. Indonesia akan mengangkat *STCs Offensive* kepada Uni Eropa (EU) terkait *Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council* sehubungan dengan MRLs Uni

Eropa untuk Clothianidin dan Thiamethoxam di dalam atau pada produk tertentu, *Waste Shipment Regulation (WSR)*, dan *Deforestation Regulation*. Sedangkan *STCs Offensive* yang diajukan kepada India terkait *Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn (Quality Control) Order, 2024*, *Dyed knitted or crochet fabric made from synthetic fibres (Quality Control) Order, 2024*, *Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023*, *Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022*, *Pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles, Footwear (Quality Control Order), 2020* dan *Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023*.

Diketahui saat ini Indonesia menerima *STCs Defensive* terkait peraturan yang diterapkan terkait dengan UU No. 33 /2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP 28/2021 tentang penyelenggaraan bidang Perindustrian dan terkait pemberlakuan SNI Wajib pada 6 jenis Bahan Baku Plastik. Secara umum MRLs Clothianidin and Thiamethoxam pada beberapa jenis pangan dalam Regulasi EU lebih ketat dibandingkan dengan MRLs yang ditetapkan di Indonesia, dikarenakan EU menggunakan pertimbangan komponen lingkungan dalam penetapan MRLs, sehingga kurang sesuai diterapkan sebagai MRL pada pangan. Pada kesempatan ini disampaikan juga bahwa penyusunan Perbadan BMR oleh Badan Pangan Nasional telah mempertimbangkan MRL yang ditetapkan oleh Codex dan negara lain serta perhitungan paparan melalui konsumsi masyarakat di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, BSN akan melakukan penyampaian *STC's* melalui e-agenda paling lambat tanggal 5 Juni 2024 untuk selanjutnya disampaikan pada sidang Komite TBT WTO pada tanggal 24 Juni 2025.

2. Mengikuti Rapat Persiapan Sidang Komite SPS-WTO ke-92

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) mengikuti Rapat Persiapan Sidang Komite SPS-WTO ke-92 Oleh Barantin secara daring pada tanggal 4 Juni 2025. Rapat ini dibuka oleh Ketua Tim Kerjasama Barantin dan dihadiri



oleh PTRI Jenewa, perwakilan dari Kementan, KKP, BPOM, Kemendag, Kemenlu, BSN, Barantin, dan Bapanas (Direkotrat PSKMP dan Direktora PPSKMP). Tujuan rapat ini adalah untuk menjaring masukan dari K/L terkait dalam rangka mempersiapkan posisi Indonesia dalam Sidang Komisi SPS – WTO ke-92 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 – 20 Juni 2024 di Jenewa Swiss. Kehadiran perwakilan Indonesia pada sidang SPS-WTO ke-92 akan diwakilkan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa.

Pertemuan SPS WTO ke-92 terdiri dari rangkaian agenda pertemuan, yaitu:

- a. *Thematic Session on Addressing Antimicrobial Resistance Through SPS Measures in International Trade* - sesi ini dapat diikuti secara *hybrid*, dan program pada sesi ini sedang difinalisasikan oleh sekretariat SPS.
- b. Pertemuan Informal SPS Committee
 - *Sixth Review of the Operation and Implementation of the SPS Agreement* - Sekretariat Komite SPS telah mensirkulasikan beberapa *draft report adoption* untuk ditanggapi oleh anggota SPS
 - Pembentukan *Transparency Working Group* - Merupakan usulan dari Selandia Baru melalui dokumen JOB/SPS/41 yang telah di sirkulasikan pada tanggal 25 April 2025. Dokumen ini merupakan engagement dari *Developing Members*.
- c. Pertemuan Formal SPS Committee
 - *Specific Trade Concerns (STCs)* - Pada Sidang Reguler Komite SPS 92 tercatat terdapat 60 STC yang disampaikan oleh negara anggota, yang terdiri dari 6 STC baru dan 54 STC yang telah dibahas pada Sidang Komite SPS sebelumnya termasuk 1 (satu) STC kepada Indonesia dari Uni Eropa, India dan Rusia terkait *Indonesia's approval procedures for animal and plant products* (ID 441). Rusia meminta untuk pertemuan Bilateral pada Pertemuan ini dan apabila Rusia berkenan, PTRI Jenewa akan *take noted* terhadap masukan Rusia pada bilateral meeting tersebut.
 - Isu-isu lainnya yang dibahas terkait penetapan BMR 2,4-D pada kopi sebesar 0,01 mg/kg oleh Jepang mendapatkan perhatian dari

Gabungan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI) mempertimbangkan bahwa ekspor kopi ke Jepang cukup banyak. Dalam hal ini Kemendag akan mempertanyakan justifikasi regulasi BMR kepada Jepang dan menghimbau agar komisi dapat mendorong CODEX untuk menetapkan MRL 2,4-D pada kopi untuk menjadi rujukan internasional.

Adapun tindak lanjut dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan surat permintaan tertulis kepada Kementan untuk mengupdate *STC Indonesia's approval procedures for animal and plant products* (ID 441) dari EU, India dan Rusia;
- Terkait isu BMR 2,4-D pada biji kopi akan dilakukan koordinasi dengan Bapanas agar regulasi 2,4-D 0,1 mg/kg dapat masuk menjadi standar Codex;
- Melaksanakan rapat kembali sesat sebelum sidang untuk menyepakati finalisasi posisi Indonesia pada pertemuan ini

3. Rapat Pembahasan Hasil Kajian Komposisi Kandungan Gizi pada Pangan Segar

Dalam rangka penyediaan informasi kandungan gizi pangan segar, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) telah melakukan kajian komposisi kandungan gizi pada pangan segar pada tahun 2023 dan 2025. Pada Tahun 2025, telah dilakukan pengujian kandungan gizi pada 65 komoditas pangan segar dengan parameter uji proksimat (kadar air, abu, lemak, protein, karbohidrat), serat pangan, mineral, asam amino dan asam lemak. Sampel pangan segar diambil dari pasar tradisional dan ritel yang ada di Jabodetabek. Sebagai tindak lanjut hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2025, Dit. PSKMP melaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Pengujian Kandungan Gizi Pangan Segar yang dilakukan dalam beberapa tahap diantaranya sebagai berikut:

- a. Rapat Pembahasan Hasil Pengujian Kandungan Gizi Pangan Segar pada 5 Juni 2025 secara *hybrid*

Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Direktur PSKMP dan dihadiri oleh pakar dari IPB University (Prof. Rimbawan dan Dr. Zuraidah Nasution, STP., M.Sc), perwakilan Pusdatin serta staf Dit. PSKMP

Bapanas. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pakar dalam menetapkan parameter dan nilai hasil pengujian yang dapat dipublikasikan guna menyediakan informasi kandungan gizi pangan segar berdasarkan data primer bagi masyarakat. Adapun beberapa poin yang dibahas dan didiskusikan bersama pakar dalam kesempatan ini antara lain:



- Disepakati terkait metode pengolahan dan pembersihan data untuk mendapatkan data yang homogen dengan menggunakan koefisien variasi (CV) sebesar 20% mengingat data yang digunakan diambil dari sampel acak.
- Untuk menetapkan nilai kandungan gizi, data yang telah diolah juga disandingkan dengan data rujukan seperti TKPI, database komposisi pangan dari beberapa negara dan referensi ilmiah.
- Disepakati juga parameter kandungan gizi yang akan dicantumkan pada database kandungan gizi pangan segar yang sedang disusun.

Sebagai tindak lanjut, Dit. PSKMP akan kembali melakukan pembersihan data (*cleaning data*) hasil analisis serta *crosscheck* dengan data rujukan untuk menentukan nilai akhir kandungan gizi pada pangan segar. Kemudian akan dilakukan finalisasi data, nama publikasi hasil kajian dan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal bersama pakar pada 20 Juni 2025.

b. Rapat Lanjutan Pembahasan Hasil Pengujian Kandungan Gizi Pangan Segar pada 20 Juni 2025 secara *hybrid*

Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya pada 5 Juni 2025, Dit. PSKMP melaksanakan Rapat Lanjutan Pembahasan Hasil Pengujian Kandungan Gizi Pangan Segar. Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Direktur PSKMP dan dihadiri oleh pakar dari IPB University (Prof. Rimbawan dan Dr. Zuraidah Nasution, STP., M.Sc), perwakilan Pusdatin

serta staf Dit. PSKMP Bapanas. Kegiatan ini bertujuan untuk finalisasi data hasil pengujian guna menyediakan informasi kandungan gizi pangan segar berdasarkan data primer bagi masyarakat. Adapun beberapa poin yang dibahas dan didiskusikan bersama pakar dalam kesempatan ini antara lain:

- Disepakati kadar karbohidrat akan menggunakan karbohidrat total dan karbohidrat tersedia pada komoditas nabati sedangkan untuk komoditas hewani menggunakan karbohidrat total.
 - Hasil pengujian kandungan gizi akan dipublish sebagai Tabel Komposisi Pangan Segar Indonesia (TKPSI).
 - Akan ditambahkan keterangan terkait perbedaan hasil yang dapat dipengaruhi oleh varietas, tingkat kematangan dan lokasi sampling.
- Sebagai tindak lanjut, Dit. PSKMP dan Pusdatin akan mempublikasi hasil pengujian kandungan gizi pangan segar melalui website Badan Pangan Nasional sebagai living dokumen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.



4. Partisipasi pada Sidang *The 18th Session Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Committee on Contaminants in Foods*

Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan negara anggota, terutama terkait standar yang berhubungan dengan kontaminan pada pangan. Standar ini akan menjadi salah satu rujukan *World Trade Organization* (WTO) untuk mengatur perdagangan internasional. Badan Pangan Nasional cq Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) merupakan *Alternate Mirror Committee* (MC) CCCF Indonesia. Partisipasi Indonesia dalam sidang ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat posisi nasional pada penyusunan standar pangan global, khususnya dalam hal pengendalian

cemaran kimia dan kontaminan dalam produk pangan. Dalam rangka mengawal posisi Indonesia pada forum internasional Dit. PSKMP mengikuti serangkaian persiapan dan sidang CCCF-18 sebagai berikut:

- a. Persiapan Sidang CCCF ke-18 dengan *Codex Committee for Asia* (CCASIA) secara daring pada 11 Juni 2025.



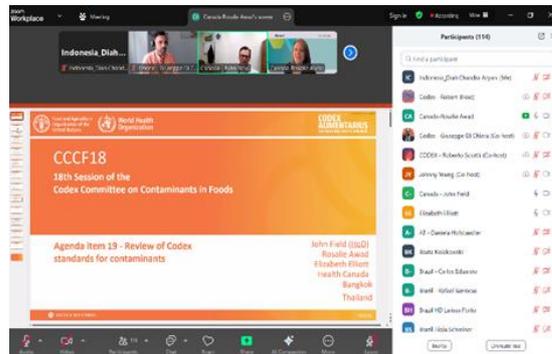
Pertemuan ini dibuka oleh CCASIA Secretariat Japan, serta dihadiri oleh delegasi Asian Members China, Japan, Singapore, Thailand, Philippines dan Indonesia (Bapanas). Tujuan pertemuan adalah

untuk bertukar pendapat dan memperkuat posisi negara-negara ASIA terkait dengan agenda khusus yang dibahas dalam sidang CCCF18. Pada pertemuan ini dibahas 8 agenda item sidang CCCF ke-18 yaitu sebagai berikut:

1. Agenda item 6: *COP for the prevention and reduction of cadmium contamination in foods;*
2. Agenda item 9: *Revision of the COP for the prevention and reduction of aflatoxin contamination in peanut;*
3. Agenda item 13: *Development of a COP for the prevention and reduction of tropane alkaloids in food and feed;*
4. Agenda item 19: *Review of Codex Standards for Contaminants;*
5. Agenda item 20 and 21:
 - a. *Follow-up work on the outcomes of JECFA evaluations and FAO/WHO expert consultations*
 - b. *Priority list of contaminants for evaluation by JECFA*
6. Agenda item 5: *MLs for lead in certain food categories*
7. Agenda item 16 and 17:
 - a. *Application of MLs to multi-ingredient products*
 - b. *Analysis of occurrence data of lead in mixed spice*
8. Agenda item 14: *Guidance on data analysis for the development of maximum levels and for improved data collection.*

Dari 8 agenda yg dibahas Indonesia telah mengirimkan posisi untuk Agenda Item 6, Agenda Item 9, Agenda Item 20 and 21; dan Agenda Item 5. Disampaikan bahwa sidang CCCF ke-18 akan dilaksanakan di Bangkok, Thailand secara *hybrid* pada tanggal 23 - 27 Juni 2025.

- b. *Virtual Working Group (VWG) Meeting* Persiapan Sidang ke-18 oleh Codex Secretariat secara daring pada 16 Juni 2025.



Setelah mengikuti rapat persiapan sidang CCCF ke-18 bersama dengan negara-negara Asia pada 11 Juni lalu, Dit. PSKMP mengikuti *virtual working group (VWG) meeting* yang diselenggarakan oleh *Codex Secretariat*. VWG ini

dibuka dan dipimpin oleh Canada selaku HoD, serta diikuti oleh delegasi negara Codex, observer, pakar, dan Delri (Badan Pangan Nasional, BPOM, Pakar IPB). Tujuan VWG ini adalah sebagai persiapan pembahasan agenda-agenda penting pada sidang CCCF-18 sebelum *plenary session*. Adapun agenda yang dibahas dalam VWG ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Review of Codex standards for contaminants* (Agenda Item 19);
- 2) *Follow-up to the outcomes of JECFA evaluations and joint FAO/WHO expert consultations* (Agenda Item 20);
- 3) *Priority list of contaminants for evaluation by JECFA* (Agenda item 21);
- 4) *Review of the Code of practice for the reduction aflatoxin B1 in raw materials and supplemental feedingstuffs for milk-producing animals* (CXC 45-1997);
- 5) *Review of the Code of practice to prevent and reduce pyrrolizidine alkaloid contamination in food and feed* (CXC 74-2014) *including the development of Guidance on sampling and analysis performance characteristics for the collection of data for submission to the GEMS/Food database.*

Pada VWG ini, Indonesia menyampaikan posisi terkait dengan *Priority list of contaminants for evaluation by JECFA*. Indonesia mengusulkan etilen oksida (EtO) dan 2-kloroetanol (2-CE) untuk masuk ke dalam *priority list* tersebut dengan kategori *high-level priority*. Indonesia mengusulkan agar kedua senyawa tersebut dikaji dengan pendekatan yang berbeda. Selain itu, Indonesia juga mengimbau negara anggota lain untuk turut memberikan data kepada JECFA agar evaluasi menjadi lebih menyeluruh dan kuat.

c. Menghadiri *The 18th Session Joint FAO/WHO Food Standards Programme CCCF* secara virtual pada 23-27 Juni 2025

The 18th Session Joint FAO/WHO Food Standards Programme CCCF

diselenggarakan secara *hybrid* di Bangkok, Thailand pada tanggal 23-27 Juni 2025. Sidang ini dipimpin oleh *chair person CCCF* (Dr. Sally Hoffer) dan dihadiri oleh 127 negara



anggota, 1 organisasi anggota dan 6 observer. Delegasi Indonesia (Delri) diwakili oleh BPOM, Bapanas dan Pakar dari IPB. Adapun kepentingan Indonesia terhadap isu yang dibahas dalam Sidang CCCF-18 diantaranya adalah:

- Batas maksimal cemaran logam berat dan cemaran mikotoksin;
- Pengembangan kode praktik (CoP) untuk pencegahan dan pengurangan kontaminasi kadmium pada pangan dan kacang-kacangan;
- Sampling Plan Aflatoksin Total dan Okratoksin A pada rempah;
- Kriteria kinerja numerik untuk metode analisis Aflatoksin Total; dan
- Daftar prioritas kontaminan.

Sidang CCCF ke-18 terdiri dari 24 agenda pembahasan, dimana Indonesia memberikan masukan pada 7 agenda pembahasan melalui

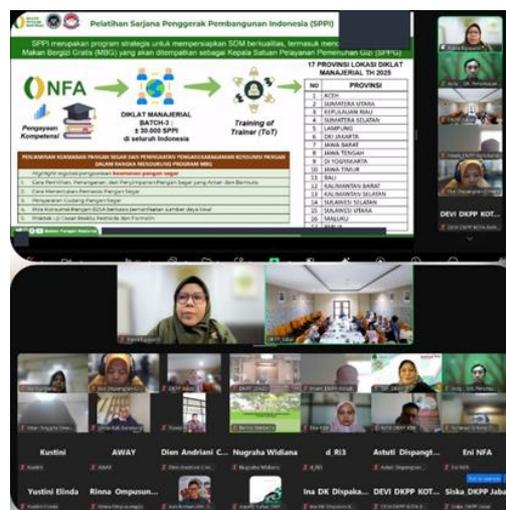
forum *Electronic Working Group*, *Circular Letter* (CL) ataupun langsung pada *plenary session*. 1 dari 7 agenda pembahasan merupakan usulan Indonesia untuk memasukan *ethylene oxide* (EtO) dan 2-chloroethanol (2-CE) dalam *priority list*. Beberapa keputusan final CCCF ke-18 akan diteruskan kepada *Codex Alimentarius Commission* (CAC) untuk diadopsi pada tahap berikutnya. Disampaikan bahwa sidang CCCF ke-19 akan dilaksanakan pada Oktober 2026 di Mesir.

B. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

1. Pemantapan dan Dukungan terhadap Diklat SPPI Batch-3 Tahun 2025

a. Penguatan ToT dan Koordinasi Pelatihan Manajerial SPPI Batch-3 dengan Dinas Pangan Provinsi Jawa Barat

Menindaklanjuti permohonan sebagai narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat pada kegiatan Penguatan ToT dan Koordinasi Pelatihan Manajerial SPPI Batch-3, telah dilaksanakan kegiatan dimaksud pada tanggal 10 Juni 2025 secara daring. Pertemuan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas



DKPP Provinsi Jabar, serta dihadiri oleh Direktur PSKMP, narasumber dari perwakilan direktorat teknis lingkup Kedeputusan 3, serta 30 orang calon tenaga pengajar di lingkup DKPP Provinsi Jabar.

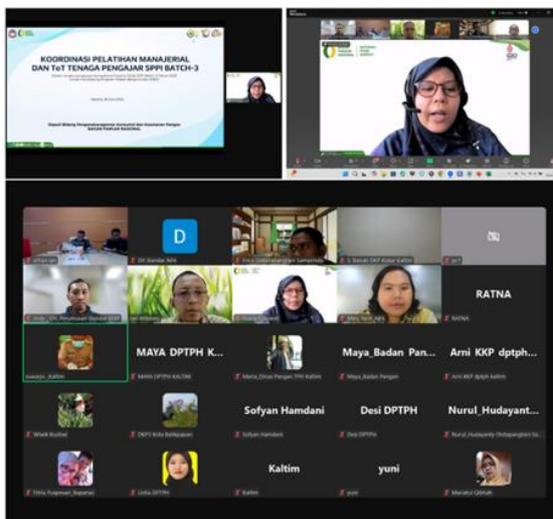
Pertemuan ini bertujuan untuk menguatkan kembali pemahaman calon tenaga pengajar terkait penyampaian materi/bahan ajar Bapanas pada Pelatihan Manajerial SPPI dimaksud, serta berkoordinasi terkait persiapan pelaksanaan pelatihan SPPI di Provinsi Jabar yang akan dimulai pada tanggal 16 Juni 2025 di 5 lokasi lemdiklat. Materi/bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta diklat SPPI adalah yang terkait tentang upaya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi dan sumber daya lokal, penjaminan keamanan pangan, serta

upaya penyelamatan pangan dalam rangka mendukung program MBG dengan alokasi 4 JP, dengan submateri sebagai berikut:

- Cara Pemilihan, Penanganan, dan Penyimpanan Pangan Segar yang Aman dan Bermutu;
- Cara Menentukan Pemasok Pangan Segar;
- Persyaratan Gudang Pangan Segar;
- Pola Konsumsi Pangan B2SA berbasis pemanfaatan sumber daya lokal; dan
- Praktik Uji Cepat Residu Pestisida dan Formalin.

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, tim koordinasi Bapanas akan mengidentifikasi kebutuhan tenaga pengajar di Provinsi Jabar dan menyiapkan bantuan calon tenaga pengajar dari lingkup Kedepujian 3 untuk pelaksanaan pelatihan tanggal 16 Juni 2025 dimaksud. Kemudian calon pengajar akan berkoordinasi dengan PIC pada masing-masing Lemdiklat terkait teknis pelaksanaan pelatihan.

- b. Rapat Koordinasi Pelatihan Manajerial SPPI dan ToT Diklat SPPI bersama dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Kalimantan Timur



Dalam rangka menguatkan kembali pemahaman calon tenaga pengajar diklat SPPI, Badan Pangan Nasional dalam hal ini Kedepujian 3 hadir dalam rapat koordinasi pelatihan manajerial SPPI dan ToT Diklat SPPI yang diselenggarakan oleh Dinas PTPH Provinsi Kalimantan Timur pada 26 Juni 2025 secara daring. Pertemuan ini dibuka

oleh Direktur PSKMP, dan dihadiri oleh lingkup Kedepujian 3 selaku narasumber, serta fungsional dan staf Dinas PTPH Provinsi Kaltim. Pada pertemuan ini disampaikan bahan ajar Bapanas kepada pengajar Provinsi

Kaltim, yakni mencakup penjaminan keamanan pangan segar dan peningkatan penganekaragaman konsumsi untuk mendukung program MBG, cara menentukan pemasok pangan segar serta pola konsumsi pangan B2SA berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal. Disampaikan bahwa jumlah peserta didik SPPI di Provinsi Kaltim sebanyak 594 siswa (dikelompokkan dalam 6 kelas kecil, 1 kelas sedang dan 1 kelas besar) dengan jumlah pengajar sebanyak 15 orang. Adapun hal yang menjadi tindak lanjut dalam pertemuan ini adalah Dinas PTPH akan berkoordinasi dengan Kolat XII Kalimantan untuk mempersiapkan pelaksanaan pelatihan manajerial SPPI Batch-3 Tahun 2025 di Satdik Dodikjur Rindam VI/MLW, Balikpapan.

c. Pembekalan Materi Calon Pengajar SPPI Provinsi DKI Jakarta

Kedeputian 3 diundang menjadi narasumber pada pertemuan pembekalan materi bagi calon pengajar SPPI Provinsi DKI Jakarta pada 12 Juni 2025. Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Prov DKI Jakarta dan dihadiri oleh Bapanas, Unhan RI serta peserta calon pengajar SPPI sebanyak 46 orang. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menguatkan kembali pemahaman calon tenaga pengajar serta berkoordinasi terkait persiapan pelaksanaan Diklat SPPI di Provinsi Jakarta. Pada pertemuan ini disampaikan penguatan materi/bahan ajar oleh pemateri dari perwakilan dari setiap Kedeputian 3 terkait dengan materi teknis dan dari Unhan terkait teknis pelaksanaan pembekalan Diklat SPPI. Peserta Calon pengajar SPPI merupakan pegawai di Dinas KPKP yang tidak hanya bekerja di Bidang Ketahanan Pangan, namun juga di bagian Pertanian, Peternakan serta penyuluh.



d. Pengayaan Materi dalam Pelaksanaan Pelatihan Manajerial Diklat SPPI Batch-3 2025

Dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Pangan Nasional turut berkontribusi yang salah satunya melalui pengayaan materi dalam pelaksanaan Pelatihan Manajerial Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) *Batch-3* Tahun 2025. Pelatihan yang digelar ini berlangsung serentak di 57 lembaga pendidikan di 18 provinsi, dengan



total peserta mencapai 30.000 orang. Para peserta SPPI ini nantinya akan memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), garda depan pelaksana program MBG di lapangan. Adapun pelaksanaan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pelatihan Manajerial SPPI pada 16 Juni 2025 di Provinsi Jawa Barat Kolat IV Cimahi di Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi dilakukan di 4 lokasi Lembaga pelatihan yakni Pusdik Kav, Pusdik Pengmilum, Pusdik Jas dan Pusdik Pal. Total peserta yang mengikuti pelatihan di wilayah ini mencapai 2.100 siswa, didampingi oleh 75 pengajar dari pusat dan daerah.
- 2) Pelaksanaan Pelatihan Manajerial SPPI pada 24 Juni 2025 di Kolat III DKI Jakarta Pusdik Polair Jakarta Utara. Dilaporkan bahwa dari total 193 peserta didik di SPPI Pusdik Polair hanya 96 peserta yang dapat menerima pelatihan, dikarenakan sebanyak 85 peserta mengikuti kegiatan upacara di Monas dan 12 lainnya diisolasi karena mengalami sakit cacar. Sehingga total 97 peserta didik tidak dapat mengikuti pelatihan. Sedangkan pengajar pada pelatihan sebanyak 12 orang dari pusat dan daerah.

- 3) Pelaksanaan Pelatihan Manajerial SPPI pada 30 Juni dilakukan pada beberapa lokasi sebagai berikut:
- Monitoring pelaksanaan diklat manajerial SPPI Batch 3 di Rindam I Bukit Barisan Pematang Siantar Sumatera Utara. Diikuti oleh sekitar 900 siswa SPPI yang dibagi kedalam 5 kelas. Kegiatan ini dimonitoring secara langsung oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bersama Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.
 - Rindam I Iskandar Muda Banda Aceh. Diikuti oleh hampir 1200 siswa yang dibagi kedalam 30 kelas.
 - Brigif I Marinir Cilandak Jakarta, dihadiri oleh sekitar 900-an siswa SPPI yang dibagi kedalam 5 kelas dan diampu oleh 20 orang pengajar pusat dan daerah.

Pada diklat dimaksud, Bapanas berkolaborasi dengan dinas urusan pangan di daerah tingkat provinsi maupun kab/kota dalam penyampaian materi "Penjaminan Keamanan Pangan Segar dan Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam rangka Mendukung Program MBG". Materi yang disampaikan dititikberatkan pada pentingnya melakukan upaya penjaminan keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, penerapan sanitasi hygiene pada SPPG, sampai kepada pentingnya pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal dalam menu MBG. Sebagai tindak lanjut, Bapanas akan terus mengawal pelaksanaan pelatihan SPPI di provinsi lain yang masih akan berlangsung sepanjang dengan bulan Juli 2025, dan mengirimkan bantuan tenaga pengajar jika memungkinkan.

2. Narasumber Sosialisasi Standar Keamanan dan Mutu Pangan serta Pelatihan Izin Edar PSAT

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Pusat terus berupaya memperkuat jaminan keamanan pangan segar dengan mendorong pelaku usaha pangan untuk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sehubungan dengan adanya permohonan dari PT. Lion Super Indo terkait permohonan narasumber dalam kegiatan sosialisasi standar keamanan

dan mutu pangan dan pelatihan serta izin edar PSAT kepada mitra pelaku usaha PSAT, Badan Pangan Nasional mendukung penuh kegiatan dimaksud dalam rangka memperkuat pemahaman dan implementasi standar keamanan, mutu dan label pangan segar dalam proses perizinan PSAT. Sosialisasi Standar Keamanan dan Mutu Pangan serta Pelatihan Izin Edar PSAT dilaksanakan di 4 wilayah yaitu di DKI Jakarta pada 18 Juni 2025, di Bandung-



Jawa Barat pada 19 Juni 2025, di Surabaya-Jawa Timur pada 26 Juni 2025 dan di Semarang-Jawa Tengah pada 30 Juni 2025.

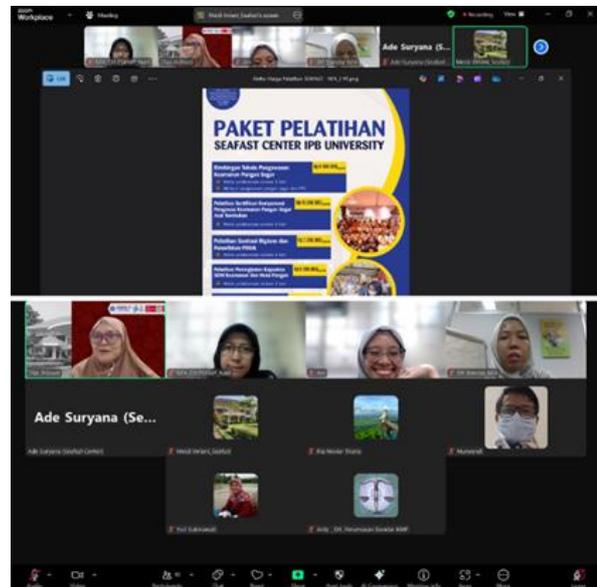
Kegiatan ini juga turut melibatkan Dinas Urusan Pangan Daerah selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi mitra pelaku usaha PSAT yang merupakan supplier PT Lion Super Indo dalam meningkatkan pemahaman terkait standar keamanan dan mutu pangan serta perizinan PSAT serta mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan produk PSAT sehingga menjamin keamanan produk pangan yang beredar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi terkait standar keamanan, mutu, label dan iklan pangan segar yang disampaikan oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, selanjutnya materi terkait perizinan PSAT serta simulasi dan pendampingan pendaftaran PSAT-PDUK melalui OSS disampaikan oleh Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan bersama dengan Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kegiatan ini telah diikuti oleh 96 mitra pelaku UMKM dari PT Lion Super Indo yang berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun dari seluruh mitra pelaku UMKM dari PT Lion Super Indo yang hadir, hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang dapat melakukan *submission data* perizinan PSAT-PDUK melalui sistem OSS, karena belum memiliki nomor NIB. Adapun hal yang perlu ditindak lanjuti dari

kegiatan ini yaitu para peserta UMKM yang belum memiliki nomor NIB diharapkan segera mengurus pendaftaran nomor NIB sebagai salah satu syarat proses registrasi izin edar PSAT-PDUK, sehingga membuka akses pasok pangan ke retail Super Indo, kemudian perlu upaya pembinaan oleh Dinas Pangan Daerah bagi pelaku UMKM yang telah mendapatkan nomor izin edar PSAT-PDUK.

3. Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan dengan SEAFast-IPB

Badan Pangan Nasional selaku otoritas kompeten keamanan pangan pusat (OKKPP) dalam melaksanakan tugas pengawasan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengawas Keamanan Pangan Segar yang diberikan kepada petugas pengawas keamanan pangan dari dinas yang menangani urusan pangan naik di tingkat provinsi



maupun kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional cq Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) bekerja sama dengan SEAFast Center - IPB University sebagai penyelenggara bimtek pengawas keamanan pangan dengan pertimbangan telah memiliki kerjasama (MoU dan PKS) dengan Badan Pangan Nasional. Dit. PSKMP melaksanakan Rapat Pembahasan Persiapan Bimtek Keamanan Pangan dengan SEAFast-IPB secara daring pada 13 Juni 2025.

Adapun hal yang dibahas pada rapat persiapan ini terkait dengan rencana waktu pelaksanaan kegiatan, biaya dan teknis pelaksanaan kegiatan. Kegiatan bimtek pengawas keamanan pangan segar direncanakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Jumlah peserta sebanyak 35 orang, yang terdiri dari perwakilan dinas urusan pangan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kegiatan bimtek

ini dilaksanakan dengan cara pembelajaran secara langsung di kelas, simulasi maupun praktek di lapangan. Disampaikan bahwa di tahun 2025, SEAFast-IPB telah mengeluarkan harga paket pelatihan per orang. Berdasarkan hasil rapat diperoleh hasil bahwa rencana waktu pelaksanaan bimtek adalah di awal bulan Agustus 2025 selama 5 hari dengan rincian 4 hari pembelajaran di kelas dan 1 hari simulasi atau praktek dilapangan.

4. Menghadiri Harmonisasi Rancangan PerBPOM tentang Penarikan dan Pemusnahan Pangan



Badan Pangan Nasional cq. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) turut andil dalam memberikan masukan pada pertemuan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penarikan dan Pemusnahan Pangan yg dilaksanakan oleh BPOM pada 13 Juni 2025 secara daring. Rapat ini dibuka oleh Kemenkum dan dihadiri oleh Kementan, Barantin, Bapanas, KKP,

Kemenkes, Kemendagri, BPJPH, BGN, dan Pemda DKI Jakarta. Tujuan rapat ini adalah pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan BPOM tentang Penarikan dan Pemusnahan Pangan sebagai revisi dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran.

Ketentuan mengenai Penarikan dan Pemusnahan dalam Peraturan Badan ini meliputi Penarikan dan Pemusnahan terhadap Pangan Olahan termasuk BTP, Bahan Baku, Bahan Penolong, Kemasan Pangan, Label; dan/atau bahan lain yang digunakan dalam proses produksi Pangan Olahan. Untuk membatasi ruang lingkup peraturan ini, maka Bapanas mengusulkan agar judul peraturan difokuskan pada “pangan olahan” bukan hanya “pangan”. Hal ini karena, terkait dengan tindak lanjut pengawasan pangan segar telah diatur dalam Peraturan Bapanas No. 2 dan No. 9 Tahun 2024. Adapun, potensi irisan dalam peraturan BPOM ini dengan tuis Bapanas adalah terkait pengawasan pangan

segar sebagai bahan baku produksi pangan olahan. Untuk itu, diusulkan apabila dalam implementasinya jika ditemukan ketidaksesuaian terhadap pangan segar yang digunakan dalam proses produksi pangan olahan agar hasil pengawasan dapat disampaikan kepada Bapanas atau dinas urusan pangan terkait. Hal tersebut telah diakomodir dalam panduan sebagai Strategi Penarikan bahwa BPOM melakukan koordinasi dengan sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan Penarikan. Kementerian Hukum menyampaikan bahwa proses harmonisasi telah selesai, dan selanjutnya akan dilakukan legal drafting dan proses penetapan.

5. Melaksanakan Seminar Keamanan Pangan dalam rangka Peringatan WFSD 2025

- a. Survei Lokasi SPPG untuk Kunjungan dalam rangkaian Peringatan WFSD

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) dan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PPSKMP) melakukan survei lapang di SPPG Yayasan Citra Sinergi Peduli dan SPPG Yayasan Puri Prima Persada



yang berlokasi di Desa Pasir Angin, Kecamatan Mega Mendung, Kab. Bogor pada 3 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan SPPG yang lebih berpotensi untuk dilakukan kunjungan dalam rangkaian kegiatan WFSD yang rencananya dilaksanakan antara tanggal 23, 24, atau 25 Juli 2025.

Rencananya dalam rangkaian acara WFSD akan dilakukan kunjungan Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan dan Mutu Pangan bersama dengan K/L terkait ke Pasar Aman Cisarua, SPPG, serta sekolah terdekat untuk sosialisasi kepada siswa/i sekolah terkait pola konsumsi B2SA untuk mendukung program MBG.

Berdasarkan survei, diketahui bahwa kedua SPPG tidak menyetok

pangan segar (pangan segar datang H-1 pemasakan sesuai dengan kuantitas yg diperlukan) sehingga langsung dimasak habis keesokan harinya. Masing-masing SPPG menggunakan tenaga kerja yang terdiri dari ahli gizi, akuntan dan kasatpol yang berasal dari masyarakat sekitar SPPG. Berdasarkan hasil kunjungan, Lokasi SPPG Yayasan Citra Sinergi Peduli (JJ Catering) memiliki akses yang lebih terjangkau dan jarak yang lebih dekat dengan jalan utama dibandingkan dengan SPPG Yayasan Puri Prima Persada. Sebagai tindak lanjut, masing-masing SPPG akan melakukan konfirmasi kesiapan Sekolah yang berpotensi untuk dikunjungi terkait dengan kesediaan dan jadwal libur sekolah. Selanjutnya akan ditetapkan 1 SPPG yang dipilih untuk dikunjungi pada kegiatan WFSD.

b. Pertemuan Persiapan Peringatan WFSD 2025

Pada peringatan WFSD tahun ini, Badan Pangan Nasional, dalam hal ini Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan menyelenggarakan acara di Bogor dengan melibatkan K/L terkait dan dinas urusan pangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi panitia guna mempersiapkan acara peringatan hari keamanan pangan sedunia tahun 2025 agar berjalan dengan baik. Pertemuan persiapan peringatan WFSD dilaksanakan pada 19 Juni 2025 di BRMP Perkebunan, Bogor. Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan dihadiri oleh Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, serta panitia WFSD. Adapun hasil dari pertemuan persiapan peringatan WFSD 2025 adalah sebagai berikut:



- Acara akan dibagi menjadi 2 sesi yaitu acara di lapangan dan acara puncak di seminar Hari Keamanan Pangan Sedunia. Acara di lapangan dilaksanakan di dua tempat yaitu pengawasan SPPG Yayasan Citra Sinergi Peduli (JJ Catering) dan edukasi B2SA di SMPN 1 Megamendung, yang kemudian dilanjutkan dengan acara puncak berupa seminar Hari Keamanan Pangan Sedunia di siang harinya.
- Kunjungan lapangan diagendakan dihadiri oleh Bapak Kepala Bapanas, Bupati Bogor, dan Kepala BGN serta K/L terkait. Akan dilakukan ceremonial pemberian dukungan Bapanas terhadap program MBG dengan penempelan poster co-branding di SPPG.
- BGtS sosialisasi B2SA di sekolah dilakukan secara parallel sejak pagi, dan akan diikuti oleh kunjungan Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Seminar Hari keamanan pangan sedunia dengan tema peran sains dalam keamanan pangan, menjadi puncak acara yg didalam nya terdapat launching indeks keamanan pangan segar (IKPS) dan penyerahan sertifikat penilaian OKKPD.

c. Persiapan Lokasi Kegiatan WFSD dan Pelaksanaan Kegiatan WFSD di SPPG DL Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung

Dalam rangka memperingati WFSD 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan Kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Pasir Angin, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor pada tanggal 23-24 Juni 2025. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan jaminan keamanan pangan segar yang digunakan sebagai bahan pokok dalam proses produksinya.



SPPG di Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Bogor adalah unit pelaksana program pemerintah untuk pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, di wilayah tersebut. SPPG ini berperan dalam penyediaan makanan bergizi gratis untuk siswa di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMP dan intervensi gizi lainnya untuk meningkatkan status gizi dan mencegah kekurangan gizi. SPPG di Megamendung juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah dan organisasi masyarakat, untuk menyukseskan program-program pemenuhan gizi.

Beberapa agenda yang dilaksanakan dalam kunjungan tersebut diantaranya adalah:

- Melihat langsung uji cepat (*rapid test*) terhadap sampel pangan segar yang diambil dari SPPG sekaligus Penyerahan *Rapid Test Kit* kepada SPPG;
- Meninjau bahan pangan, penyimpanan dan penggudangan, proses pengolahan, packing dan proses distribusi makanan di Dapur SPPG;
- Penyerahan poster panel dan sticker keamanan pangan segar sebagai bentuk komunikasi, informasi dan edukasi kepada SPPG; dan
- Mengunjungi SDN Pasir Angin 01 dalam rangka Sosialisasi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) *Goes To School*.

d. Seminar Peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia Tahun 2025

Seminar Keamanan Pangan dalam Rangka peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia diadakan secara *hybrid* pada tanggal 24 Juni 2025 di IPB International Convention Center. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Walikota Bogor, Kementerian/Lembaga terkait, Pakar, Asosiasi, Pelaku Usaha, Konsumen, Dinas Urusan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, serta fungsional dan staf Kedeputan Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Peringatan WFSD pada tahun 2025 ini mengusung tema “Keamanan Pangan: Sains dalam Aksi,” yang menyoroti peran penting sains dalam memastikan makanan yang kita konsumsi aman.

Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sains dalam menjamin keamanan pangan, memperkuat kolaborasi lintas sektor (termasuk pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha), menyebarluaskan inovasi ilmiah, serta mendorong kebijakan berbasis bukti guna mendukung sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Adapun agenda penting pada kegiatan ini diantaranya adalah *launching* Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS), penyerahan sertifikat kepada Provinsi yang meraih skor IKPS tertinggi, penyerahan sertifikat penilaian OKKPD bagi 7 Provinsi (Papua, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan NTB), seminar keamanan pangan, sosialisasi IKPS dan diskusi interaktif.

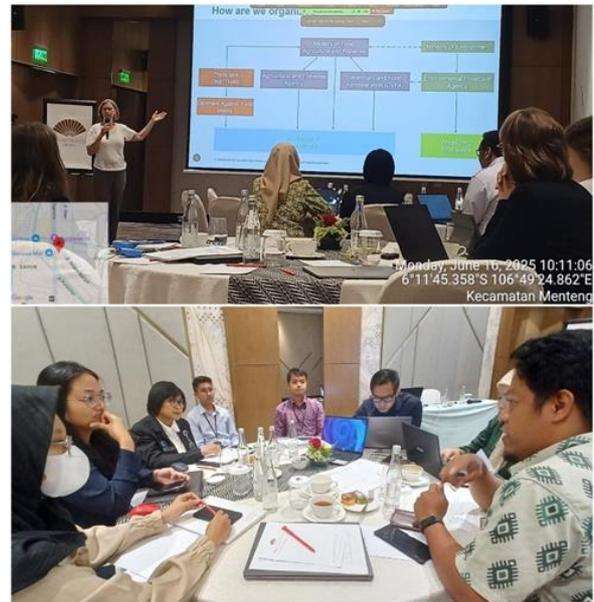


6. Menghadiri Strategic Sector Cooperation (SSC) Mission Activities on Food Loss and Waste

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan *food loss and waste*, Badan Pangan Nasional menghadiri *Strategic Sector Cooperation (SSC) Mission Activities on Food Loss and Waste* yang diselenggarakan oleh Kedubes Denmark pada 16 Juni 2025 secara *hybrid* di Hotel Mandarin Oriental. *Strategic Sector Cooperation (SSC) in Food Loss and Waste* merupakan sebuah bentuk kerja sama bilateral Denmark-Indonesia yang berfokus pada pengurangan Susut dan Sisa Pangan (SSP) di sepanjang rantai pasok pangan. Kegiatan *knowledge sharing* dan workshop kali ini merupakan follow up dari kegiatan misi dan diskusi yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Oktober 2024.

Kegiatan ini dibuka oleh *Food and Agriculture Sector Counsellor*, Kedutaan Besar Denmark di Indonesia dan dihadiri oleh perwakilan *Division of Veterinary and Food Administration (DVFA)*, *Ministry of Food, Agriculture and Fisheries* Denmark, perwakilan Bappenas, Bapanas, BPOM, BGN, Kemlu, Kemenpar, pegiat pangan (Foodbank Indonesia, Foodcycle, SOS), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta perwakilan Dinas Pangan dari beberapa wilayah di Indonesia.

Adapun agenda pembahasan pada sesi *knowledge sharing and workshop* yaitu *addressing FLW Regulation* dan *food waste reduction in professional kitchen*. Proyek SSC ini berlangsung selama 3 tahun, dengan berbagai rangkaian kegiatan SSC yang telah dan akan dilakukan, diharapkan nantinya dapat tersusun *roadmap* serta *guideline/modul* standar pengurangan SSP di Indonesia



7. Menghadiri Seminar Haqfest 2025

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) menghadiri Seminar Nasional Haqfest 2025 di IPB ICC Bogor pada 18 Juni 2025. HaQFest merupakan forum yang diinisiasi oleh Alumni Business Channel (ABC) IPB yang



mempertemukan para alumni IPB yang bergerak di dunia usaha pangan, mulai dari tingkat usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) sampai tingkat pengusaha besar. Hadir pada seminar HaQFest antara lain Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) HA IPB, Kepala Badan POM, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Deputi Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan

Pangan Bapanas, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Pangan, perwakilan perangkat daerah di Kota Bogor, akademisi, dan pelaku usaha pangan.

Pada forum ini dibahas permasalahan terkait pangan, terutama tentang aspek halal, kualitas, dan keamanan pangan. Tema utama yang diangkat adalah Mewujudkan Pangan yang Aman, Inovatif, dan Berdaya Saing, Menuju Generasi Emas 2045. Khusus pada tahun ini, diskusi menyoroti masalah halal, kualitas, dan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusung Presiden RI. Forum ini merupakan ruang kolaborasi, diskusi, dan pembelajaran bersama antara pihak akademisi, pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat untuk menjawab tantangan dalam dunia pangan pada program MBG.

8. Mengikuti Rapat PAK Rancangan Perpres tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Badan Pangan Nasional mendukung penuh terhadap akselerasi pelaksanaan program prioritas nasional makan bergizi gratis (MBG) agar menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Program MBG merupakan



elemen strategis dalam merealisasikan visi Indonesia Emas 2045, sehingga diperlukan regulasi sebagai dasar hukum penyelenggaraannya sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) menghadiri Rapat PAK Rancangan Perpres tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan secara *hybrid* pada 25 Juni 2025 di Park Hyatt Jakarta.

Rapat ini dibuka oleh Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN) dan dipimpin oleh Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan serta perwakilan kementerian/lembaga, anggota PAK (BGN, Bappenas, Kemendagri, Kemensetneg, Staf Kepresidenan, Kemenkum, Kemhan, Kementerian BUMN, KLH, Kemenkop, Kemenag, BPKP, Bapanas, BPOM, BKN, BPJPH, Jasa Pemerintah, TNI AD dan

Kepolisian RI). Tujuan rapat ini adalah untuk menjaring masukan dari kementerian/lembaga terkait tata kelola penyelenggaraan program MBG. Pada rapat ini sampaikan bahwa BGN tengah mempersiapkan lebih dari 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan bertugas langsung di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan yang tidak hanya menyangkut aspek teknis dan operasional, tetapi juga kesiapan kebijakan, regulasi serta integrasi lintas sektor. Harapannya penyusunan Perpres ini dapat segera dituntaskan demi memastikan implementasi Program MBG yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.

C. Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan

1. Progres Revisi RPP tentang Perubahan atas PP No. 86/2019 tentang Keamanan Pangan

Badan Pangan Nasional terus mengawal jalannya progres revisi RPP tentang Perubahan atas PP 86/2019 tentang Keamanan Pangan. Pada 10 Juni 2025, Badan Pangan Nasional telah mengirimkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional No. 141/HK.02.02/K/06/2025 terkait Penyampaian Paraf Kembali pada Naskah RPP tentang Perubahan atas PP No. 86/2019 tentang Keamanan Pangan kepada Menteri Sekretaris Negara. Pada Juni 2025, draft RPP atas PP 86/2019 telah diparaf oleh semua Kepala Kementerian/Lembaga, diantaranya Kemenko Pangan, Badan Pangan Nasional, Badan POM dan Kementerian Pertanian. Sehingga saat ini sedang berproses penandatanganan oleh Presiden.



2. Menghadiri Rapat Koordinasi Penyelarasan Regulasi dari Kemenko Pangan

Menindaklanjuti undangan rapat koordinasi penyelarasan regulasi terkait keamanan dan mutu pangan segar, Direktorat PSKMP hadir pada Rapat

Koordinasi Penyelarasan Regulasi yang diselenggarakan oleh Kemenko Pangan pada tanggal 11 Juni 2025 secara *hybrid* di Hotel Morissey. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan Gizi Kemenko Pangan dan dihadiri oleh perwakilan OSH Kemenko Pangan, Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Dalam Negeri Kemenko Pangan, Karo Hukum Kementan, dan Bapanas (OSH dan Dit PSKMP). Tujuan rapat ini untuk membahas harmonisasi regulasi terkait keamanan dan mutu pangan segar, khususnya mengenai standar mutu dan label beras, batas maksimal cemaran dan batas maksimal residu pestisida, yang saat ini telah diatur dalam PerBapanas No. 2/2023 tentang Persyaratan Mutu Dan Label Beras, PerBapanas No. 10/2024 tentang Batas Maksimal Cemaran dalam PSAT, dan PerBapanas No.15/2024 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida dalam Pangan Segar.

Sebelum terbentuknya Badan Pangan Nasional, pengawasan keamanan dan mutu pangan segar mengacu pada Permentan No. 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras, Permentan 48/2017 tentang Beras Khusus, dan Permentan No.53/2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT, yang sampai saat ini peraturan tersebut belum dicabut oleh Kementan. Namun berdasarkan perkembangan teknologi, standar internasional serta kondisi di lapangan, peraturan tersebut sudah tidak lagi sesuai. Untuk itu, Dit. PSKMP menyusun Peraturan Bapanas terkait keamanan dan mutu pangan untuk mengakomodir kebutuhan pengawasan. Yang dalam penyusunannya, telah melalui kajian ilmiah (kajian risiko) mempertimbangkan Codex, situasi konsumsi pangan di Indonesia, kesiapan pelaku usaha, laboratorium, dll. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi dan advokasi ke pengawas pangan (pusat dan daerah) dan pelaku usaha.

Untuk menghindari adanya dualisme standar dan kebingungan di pelaku usaha dan pengawas pangan, Kemenko Pangan menyampaikan bahwa perlu dilakukan penyelarasan



yaitu dengan mencabut Permentan atau merevisi Permentan tersebut dengan melihat kesesuai terhadap substansi yang telah diatur dalam Peraturan Bapanas. Sebelumnya disampaikan bahwa Badan Pangan Nasional telah bersurat ke Kementan pada melalui surat Sestama Bapanas ke Plt. Mentan dan Sekjen Kementan pada tahun 2023 perihal permohonan pencabutan Permentan yang redundant dengan Peraturan Bapanas, namun tidak ada respon dari Kementan. Adapun tindak lanjut dari pertemuan ini adalah:

- Kementan akan menyampaikan laporan kepada pimpinan terkait perlunya pencabutan Permentan terkait standar keamanan dan mutu pangan; dan
- Kemenko pangan akan menyampaikan risalah pertemuan dan rekomendasi tindak lanjut terhadap permasalahan ini kepada Kementan dan Bapanas.

3. Menghadiri Rapat Pembahasan Peran Fortifikasi Pangan Skala Besar (LSFF) oleh Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI)

Dalam rangka mendukung fortifikasi pangan, Dit PSKMP menghadiri Pertemuan *Large Scale Food Fortification* (LSFF) yang diselenggarakan oleh KFI berkolaborasi dengan Techno Serve pada tgl 12 Juni 2025 di Borobudur Hotel. Pertemuan ini dibuka oleh Director of Indonesia Nutrition Foundation for Food Fortification KFI dan dihadiri oleh K/L terkait (Bappenas,



Kemenkes, BPOM, Bapanas, Kemendag, Kemenperin, BSN); Asosiasi Pangan (PATPI, Pergizi pangan, PERPADI, APTINDO, GIMNI, GAPMMI, AIMMI); Mitra Pembangunan (WHO, NI, WFP, GHS, World Bank, Unicef, GAIN), pelaku usaha (BULOG, Food Station).

DI Indonesia saat ini terdapat 3 pangan dengan fortifikasi wajib yaitu garam,

tepung terigu dan minyak goreng. Sedangkan fortifikasi beras dalam tahap persiapan pelaksanaan dengan target khusus, dimana pemanfaatan beras fortifikasi pada bantuan pangan menjadi salah satu indikator dalam RPJMN 2025-2029 Badan Pangan Nasional. Sehingga dibutuhkan penguatan sarana produksi dan distribusi. Untuk itu, pertemuan ini ditujukan sebagai forum diskusi terkait kendala dan evaluasi pelaksanaan fortifikasi skala besar di Indonesia, termasuk kesiapan pelaksanaan fortifikasi beras. Saat ini telah dibentuk Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional yang berkedudukan dan dipimpin oleh Bappenas yang beranggotakan perwakilan K/L dan stakeholder termasuk Bapanas. Forum berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan, implementasi, pemantauan dan evaluasi, serta penyelesaian masalah yang menghambat program fortifikasi pangan wajib. Adapun fokus masalah dalam pelaksanaan fortifikasi beras yaitu:

- Terdapat 160.000 penggilingan beras di Indonesia, namun hanya 6 pelaku usaha yang melakukan produksi beras fortifikasi. Hal ini dikarenakan kurangnya penguasaan teknologi dan biaya investasi yang tinggi.
- Proses *blending* premix zat gizi belum dilakukan secara terintegrasi sejak penggilingan gabah, sehingga menambah biaya produksi.
- Belum terbentuk pasar yang besar untuk beras fortifikasi, saat ini masih terbatas di kalangan masyarakat kelas atas untuk beras fortifikasi secara komersial.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, diharapkan pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang dapat menyerap produksi pangan terfortifikasi, dan melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, khususnya penggilingan beras untuk memproduksi beras fortifikasi sesuai dengan standar. Serta melakukan edukasi dan advokasi terkait pentingnya pangan terfortifikasi. Adapun hal yang perlu ditindaklanjuti pada pertemuan ini yaitu forum diskusi terkait fortifikasi skala besar perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pangan terfortifikasi, serta perlu diadakan pertemuan *sharing session* antar pelaku usaha terkait kendala dan solusi dalam produksi pangan terfortifikasi.

4. Mengikuti Pelatihan Pengembangan SNI oleh BSN

Dalam rangka mendukung kapasitas SDM, Dit. PSKMP mengikuti pelatihan Pengembangan SNI yang diadakan oleh Direktorat Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar BSN secara daring pada tanggal 18 Juni 2025. Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan Standar dan dihadiri oleh K/L terkait yang mewakili sekretariat Komtek. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi SDM perumusan pengembangan standar, serta untuk menjamin bahwa SNI disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti oleh pengguna SNI.

Penyusunan SNI mengacu pada PBSN 8/2022 dan turunannya yaitu Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia No 4/2023, Pedoman Penomoran Standar Nasional Indonesia No 5/2023, dan Pedoman tenaga Pengendalian Mutu Standar Nasional Indonesia No.6/2023. Beberapa materi dalam kegiatan pelatihan Pengembangan SNI, yaitu:



Peraturan Badan Standardisasi Nasional No.8 Tahun 2022 tentang Pengembangan SNI - Perumusan SNI, Peraturan Badan Standardisasi Nasional No.8 Tahun 2022 tentang Pengembangan SNI - Komite Teknis dan kaji ulang, Pedoman tentang Penulisan SNI No.4 Tahun 2023, dan Pedoman tentang Penomoran SNI No.5 Tahun 2023 dan SISPK.

Diharapkan SNI yang disusun merupakan standar yang dibutuhkan serta dapat diterapkan di lapangan baik oleh pelaku usaha maupun pengawas. Selain itu, penyusunan SNI harus memperhatikan standar dan isu yang berkembang secara internasional. Komtek dapat turut aktif dalam penyusunan standar ISO dan SMIIC. Dalam kegiatan pelatihan ini dilakukan training simulasi (tutorial) penyusunan SNI seperti format, tata bahasa dan lainnya, sehingga dapat diimplementasikan oleh sekretariat Komtek dalam penyusunan SNI. Adapun tindak lanjut dari pelatihan ini yaitu sekretariat

komtek diharapkan dapat menyiapkan template penulisan SNI karena standar penulisan tersebut sifatnya administratif sehingga tim komtek bisa lebih fokus ke esensi substansi SNI.

5. Menghadiri Diseminasi Profil Konsumsi Pangan Fortifikasi Wajib dan Asupan Gizi Mikro Indonesia oleh Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI)



Dit. PSKMP menghadiri pertemuan Diseminasi Profil Konsumsi Pangan Fortifikasi Wajib dan Asupan Gizi Mikro Indonesia yang diselenggarakan oleh KFI pada tanggal 26 Juni 2025 di Bale Panjang TMII. Pertemuan ini dibuka oleh Direktur KFI dan dihadiri oleh Prof Soekirman, Prof Razak, Prof Drajat, serta perwakilan dari Bappenas, Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, Bapanas, BPOM, Asosiasi, Unicef, WB, WFP, WHO, GHS, LSM, GAIN, sekretariat FKFPN, dan Akademisi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat efektifitas fortifikasi wajib yang telah berlangsung selama ini, berdasarkan Profil

Konsumsi Pangan Fortifikasi Wajib dan Asupan Gizi Mikro di Indonesia yang diestimasi dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Data Susenas yang digunakan merupakan data pengeluaran rumah tangga untuk pembelian per jenis pangan seperti pembelian beras, garam, minyak, tepung, dll. Data tersebut kemudian dikonversikan dengan rata-rata harga pangan dari panel harga pangan Bapanas (sebagai referensi harga pangan fortifikasi) untuk mendapatkan volume konsumsi pangan (kg atau liter). Data pengeluaran rumah tangga ini juga digunakan sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan kuintil pendapatan. Namun metode pengolahan data memiliki kekurangan, oleh sebab itu pengolahan data memperhitungkan standar deviasi yang telah ditentukan misalnya terhadap perhitungan konsumsi garam, apabila hasil pengolahan data garam yang dihitung

berdasarkan panel harga Bapanas (harga garam beryodium) dan standar deviasi yang telah ditetapkan menunjukkan di bawah Panel harga, maka garam yang dikonsumsi dianggap bukan garam beryodium.

Data volume konsumsi pangan fortifikasi yang telah didapat kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan pemenuhan mikronutrient dari konsumsi pangan fortifikasi. Berdasarkan laporan dari Prof Drajat, Fortifikasi pada pangan berkontribusi 20-30% terhadap pemenuhan AKG per hari. Saat ini, Prof Drajat dan tim sedang melakukan pendaataan konsumsi rumah tangga keluarga miskin di Jaktim dan kab Bogor terkait penggunaan tepung, garam, minyak. Diharapkan berdasarkan proyek seperti ini akan didapati angka koreksi sehingga data yang diolah menjadi lebih akurat.

D. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina

1. Narasumber Persiapan Penilaian OKKPD Kab/Kota oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PSKMP) diundang menjadi narasumber pada kegiatan Persiapan Penilaian OKKPD Kab/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara secara daring pada 3 Juni 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur PSKMP serta dihadiri



oleh OKKPD Provinsi Sulteng serta staf dan fungsional Dit. PSKMP. Tujuan dilakukannya pertemuan ini adalah untuk memberikan gambaran dan mempersiapkan penilaian sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar kepada OKKPD Provinsi selaku tim penilai OKKPD Kab/Kota. OKKPD Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan penilaian OKKPD Kab/Kota pada 5 daerah yaitu Kota Palu, Kabupaten Parigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Banggai (Luwuk). Pada pertemuan ini, Dit. PSKMP menjelaskan secara detail terkait kriteria penilaian sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar OKKPD

Kab/Kota (kelembagaan, sumber daya manusia, pelayanan penjaminan pangan segar sebelum diedarkan, pengawasan pangan segar di peredaran, pendataan, pembinaan, KIE, serta prasarana dan sarana) beserta dengan bobot nilai dan data dukung dari setiap aspek tersebut.

2. Verifikasi Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan OKKPD Kab/Kota Provinsi Aceh dan NTT

Badan Pangan Nasional telah melakukan penilaian penerapan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar pada OKKPD Kabupaten/Kota sejak tahun 2024 secara bertahap di 38 provinsi. Pada tahun 2025, penilaian OKKPD Kabupaten/Kota dilakukan di 27 provinsi, salah satunya yaitu OKKPD Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penilaian OKKPD Kab/Kota dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi dalam kegiatan koordinasi, kerjasama, advokasi,



sosialisasi dan KIE di bidang standar keamanan dan mutu pangan daerah. Tahap persiapan penilaian OKKPD telah dilakukan dengan pengumpulan dokumen bukti dukung oleh setiap kab/kota yang kemudian dilakukan penilaian oleh tim penilai provinsi. Selanjutnya Bapanas melakukan verifikasi hasil penilaian OKKPD Kab/Kota yang telah dilakukan oleh provinsi Aceh dan NTT pada 11-13 Juni 2025.

OKKPD Provinsi Aceh telah melakukan penilaian OKKPD Kab/Kota pada 9-14 Mei 2025 untuk 5 Kab/Kota diantaranya adalah Kab. Aceh, Kab. Pidie, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Tamiang dan Kab. Bireun. Berdasarkan hasil verifikasi, secara umum seluruh kabupaten telah melaksanakan fungsi pengawasan keamanan pangan namun belum memiliki dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan yang baik. Secara garis besar, hasil verifikasi penilaian OKKPD Kab/Kota memerlukan perbaikan terhadap SK

pembentukan OKKPD untuk dilengkapi dengan struktur organisasi, melengkapi bukti dukung koordinasi dan komunikasi permasalahan, serta bukti penyampaian laporan kepada provinsi. Sebagai tindak lanjut, tim penilai Provinsi Aceh akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada OKKPD Kab/Kota serta mengarahkan untuk melengkapi kekurangan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penilaian sampai tanggal 20 Juni 2025. Selanjutnya hasil verifikasi penilaian akan diperbarui setelah tanggal 20 Juni 2025 berdasarkan update bukti dukung penilaian untuk selanjutnya dilakukan sidang Komtek.

Penilaian sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar OKKPD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dilaksanakan di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Secara umum, hasil verifikasi menunjukkan bahwa lima OKKPD kabupaten/kota yang dinilai telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan segar. Komitmen



tersebut tercermin dari adanya struktur organisasi yang telah dibentuk, penugasan personel teknis, serta pelaksanaan layanan sertifikasi dan pengawasan yang telah dimulai meskipun dalam keterbatasan. Sebagai tindak lanjut, tim verifikasi akan menyusun laporan penilaian lengkap yang memuat rekomendasi teknis dan kelembagaan untuk masing-masing OKKPD.

Laporan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada OKKPD kabupaten/kota dan provinsi sebagai lampiran sertifikat yang diterbitkan terkait sebagai dasar perbaikan dan penguatan kelembagaan OKKPD di masa mendatang.

3. Pendampingan Penilaian OKKPD Kab/Kota Provinsi Sulawesi Barat

Pada tahun ini OKKPD Provinsi Sulawesi Barat menilai 6 OKKPD Kabupaten/Kota yaitu Kab. Mamuju, Kab. Majene, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju Utara, dan Kab. Polewali Mandar. Pada tahun 2024, tim penilai OKKPD Kab/Kota dari Provinsi Sulawesi Barat telah menilai 6 kabupaten/kota tersebut, namun hasil dari penilaian ditangguhkan karena belum memenuhi tata cara/metoda penilaian yang sesuai sehingga



hasilnya dianggap tidak valid. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun ini dilakukan penilaian ulang dengan didampingi oleh tim penilai dari Bapanas sehingga diharapkan dapat melakukan penilaian sesuai dengan panduan yang telah ada.

Pendampingan penilaian dilakukan pada tanggal 12- 14 Juni 2025. Penilaian kabupaten pertama yang didampingi adalah Kab. Mamuju. Tim penilai pusat dan provinsi bersama-sama melihat data dukung yang telah dipersiapkan atau telah dipenuhi oleh OKKPD Kab/Kota lalu bersama-sama menyamakan persepsi nilai dari masing-masing kriteria/poin yang harus dipenuhi dalam penilaian dimaksud. Dari hasil penilaian OKKPD Kab. Mamuju didapatkan hasil secara keseluruhan poin/kriteria sudah dilakukan dan didokumentasikan dengan baik, namun ada beberapa aspek yang menjadi catatan penting salah satunya adalah aspek pengendalian internal.

3.2.3 Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

A. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Kegiatan monitoring prioritas pada program AEA Koordinasi dilaksanakan sebagai berikut

1. Pertemuan Koordinasi Penjaminan Keamanan Pangan Segar di Peredaran

Pertemuan audiensi Penjaminan Keamanan Pangan Segar di Peredaran membahas persyaratan area pemantauan mutu dan keamanan pangan di pasar rakyat dan akan tetap memasukkannya di dalam RSNI. Kemendag meminta Bapanas mendukung operasionalisasi



area pemantauan mutu dan keamanan tersebut melalui pendampingan/ bimtek dan penyediaan rasi test kitedaran dilaksanakan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat. Pertemuan audiensi bertujuan untuk mensinkronisasikan upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran dengan kebijakan dan program Kemendag.

Pada prinsipnya Kemendag menyetujui usulan Bapanas terkait penambah. Kemendag perlu mengkaji lebih lanjut terkait usulan untuk memberlakukan SNI Pasar Rakyat secara wajib untuk seluruh pasar rakyat di Indonesia. Terkait kerja sama pengujian disetujui dan dapat dikoordinasikan lebih lanjut

2. Penjaringan Harga Pasar Dalam Rangka Persiapan Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan (Kab Bandung, Jawa Barat)

Penjaringan Harga Pasar Dalam Rangka Persiapan Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan dilakukan untuk mengumpulkan bahan penyusunan harga perkiraan sendiri. Penjaringan harga pasar turut didampingi oleh auditor dari inspektorat dan ketua tim kerja pengadaan Biro KPU sehingga proses pengadaan dapat terlaksana secara akuntabel.

Penjaringan harga dilakukan dengan mengunjungi PT. Sanggar Karya (industri karoseri kendaraan bermotor) yang berada di Bojong Sereh Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Tim penjaringan Harga pasar diterima oleh Tim Admin dan Pemasaran PT. Sanggar Karya. Pada tahun 2024 PT. Sanggar Karya merupakan penyedia yang mengerjakan pengadaan Mobil Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan dan sampai dengan saat ini telah memperoleh 3 (tiga) paket pekerjaan karoseri yang diperoleh melalui e-katalog.



3. Penjaringan Harga Pasar Dalam Rangka Persiapan Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan (Bekasi, Jawa Barat)

Penjaringan Harga Pasar Dalam Rangka Persiapan Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan dilakukan untuk mengumpulkan bahan penyusunan harga perkiraan sendiri. Penjaringan harga pasar turut didampingi oleh auditor dari inspektorat dan ketua tim kerja pengadaan Biro KPU sehingga proses pengadaan dapat terlaksana secara akuntabel.



Penjaringan harga dilakukan dengan mengunjungi PT. Ambulance Pintar Indonesia (industri karoseri kendaraan bermotor) yang berada di Babelan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Tim penjaringan Harga pasar diterima oleh Pemilik/owner dan Direktur Pemasaran. PT. Ambulance Pintar Indonesia pada tahun 2023 merupakan penyedia yang mengerjakan pengadaan Mobil Laboratorium Keliling Pengawas Keamanan Pangan. Pada tahun 2025 sampai dengan saat ini PT. Ambulance Pintar Indonesia telah memperoleh pekerjaan karoseri sebanyak 88 unit untuk sektor

pemerintah yang diperoleh melalui e-katalog versi 6.

4. Pembekalan Materi Bagi Calon Tenaga Pengajar Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta.



Pertemuan Pembekalan Materi Bagi Calon Tenaga Pengajar Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dilaksanakan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta pada 12 Juni 2025. Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPKP Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan dari Universitas Pertahanan RI dan

Fungsional Badan Pangan Nasional (Dit 3.1, 3.2, dan 3.3), serta peserta calon tenaga pengajar SPPI yang berjumlah 46 orang.

Pertemuan bertujuan untuk memberikan pembekalan materi bagi calon tenaga pengajar Diklat SPPI di lingkup Dinas KPKP Prov. DKI Jakarta. SPPI yang mengikuti Diklat di Prov. Jakarta berjumlah 3.173 orang dengan latar belakang Pendidikan D4-S2. Mrk berasal dari berbagai daerah dan sebagian besar adalah laki-laki. Lokasi Diklat tersebar di 7 (tujuh) lokasi antara lain: Marinir Cilandak, Wingdik AU Halim, Satlat Brimob, Unhan RI, dll. Kebutuhan tenaga pengajar sebanyak 86 orang.

5. Rapat Persiapan Go Ekspor / Akses Pasar Mangga Gedong dari Indonesia ke Jepang

Rapat Persiapan Go Ekspor / Akses Pasar Mangga Gedong dari Indonesia ke Jepang telah dilaksanakan di BKHIT Jawa Barat, Bandung pada 12 Juni 2025 dimana rapat dibuka oleh Deputi Bidang Karantina Tumbuhan dan dipimpin oleh Direktur Standar Karantina Tumbuhan. Rapat bertujuan untuk membahas persiapan investigasi Tim Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Jepang

(MAFF) terhadap kebun dan rumah pengemasan buah Mangga Gedong Indonesia yang akan diekspor ke Jepang.

Proses negosiasi akses pasar buah Mangga Gedong Indonesia ke Jepang sudah memasuki tahap ke-8 (delapan) yaitu “Evaluation of requesting country’s implementation system of risk management measures” dari 11 (sebelas) tahapan yang dipersyaratkan oleh pemerintah Jepang dimana pada pada tahap ke-8 (delapan) MAFF akan melakukan investigasi ke kebun dan rumah pengemasan Mangga Gedong. Saat ini rumah pengemasan yang memiliki fasilitas VHT hanya ada 1 (satu) yaitu PT. Buah Angkasa yang berada di Provinsi DKI Jakarta, sehingga PT. Buah Angkasa ditetapkan menjadi rumah pengemasan yang akan diinvestigasi oleh MAFF. Simulasi Packing House PT. Buah Angkasa pada 7 Juli 2025 (diikuti oleh Barantin, Dirjen Horti, Bapanas, dan dinas terkait).



6. Talk Show Keamanan Pangan dan Penganangan Gerakan Makan Pangan Segar Berizin Edar dan Aman (GEMPAR BERIMAN)

Dalam rangka memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia dan Hari Jadi Bogor Ke-543, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor melaksanakan Talk Show Keamanan Pangan dan Penganangan Gerakan Makan



Pangan Segar Berizin Edar dan Aman (GEMPAR BERIMAN) dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha pangan tentang keamanan pangan yang dilaksanakan di Stadion Pakansari Cibinong, Kab Bogor pada tanggal 16 Juni 2025.

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan hadir

sebagai narasumber pada Talk Show tersebut beserta akademisi dari IPB dan Konsultan yang sekaligus pelaku usaha yang konsen dengan keamanan pangan. Direktur PPSKMP menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Pemerintah dalam menerbitkan nomor pendaftaran bagi setiap pangan segar asal tumbuhan baik yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor yang diedarkan dalam kemasan berlabel sampai dengan saat ini masih gratis, diharapkan menjadi motivasi bagi para pelaku usaha PSAT.

7. Seminar Arah Transformasi Sistem Pangan di RUU Pangan



Dalam rangka mendorong penguatan sistem pangan yang inklusif dan berkeadilan, Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia (JP2GI) bersama Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial berkolaborasi melaksanakan Bincang Pangan Sehat Lestari

seri-3 melalui "Seminar Arah Transformasi Sistem Pangan di RUU Pangan" di Hotel Sofyan Cut Meutia pada tanggal 17 Juni 2025.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan pada Seminar Arah Transformasi Sistem Pangan pada RUU Pangan: a) Memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan; b) Regenerasi Produsen Pangan; c) Afirmasi terhadap penganekaragaman pangan sekaligus penguatan pangan local termasuk pangan perairan dan kearifan lokal; d) Memperkuat tata Kelola pangan dengan teknologi termasuk mengelola food loss and food waste. Sehubungan saat ini masih berproses penyusunan naskah akademik revisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang merupakan usul inisiatif dari DPR, yakni komisi IV maka hasil seminar ini diharapkan dapat menjadi bahan materi pendukung

dalam rangka penyusunan naskah akademik revisi UU 18 tahun 2012 tentang pangan.

8. Undangan Rapat Kerjasama Sektor Strategis (SSC) Food Loss and Waste (FLW) - Kedutaan Denmark



Kegiatan dibuka oleh Food and Agriculture Sector Counsellor dari kedutaan besar Denmark. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pangan Nasional (NFA), BPOM, Bapenas, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, serta organisasi seperti Foodbank of Indonesia, Foodcycle, dan SOS.

Tujuan kegiatan adalah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan antara Denmark dan Indonesia terkait kebijakan serta praktik pengurangan Food Lost and Waste (FLW), termasuk donasi pangan dan pemanfaatan makanan berlebih.

Salah satu rekomendasi untuk mengoptimalkan keamanan pangan di Indonesia, khususnya dalam konteks redistribusi makanan berlebih, adalah penyusunan panduan teknis yang sederhana, jelas, dan mudah diaplikasikan oleh pelaku di lapangan. Panduan tersebut disarankan untuk disajikan dalam bentuk media visual seperti flyer atau infografis edukatif, agar lebih komunikatif dan efektif untuk digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan makanan sisa

9. Business meeting dengan komunitas bisnis Pakistan – Indonesia

Business meeting telah dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 di Kedutaan Besar Republic Islam Pakistan, dimana rapat dipimpin oleh Atase Perdagangan dan Investasi Pakistan dan dihadiri oleh Dubes Pakistan untuk Indonesia, perwakilan APATF yaitu organisasi bisnis Pakistan. Rapat bertujuan untuk menggali potensi kerjasama, khususnya di bidang ketahanan pangan, perdagangan dan pertanian.

Pakistan secara aktif melakukan penjajakan ke negara-negara ASEAN melalui beberapa kegiatan, diantaranya adalah: a) business buyer delegation (38 anggota) dari Indonesia ke Pakistan pada April 2025; b) Pakistan sebagai penyelenggara the 2nd ASEAN-Pakistan business opportunities conference April 2025; c) Implementasi Pakistan Electronic Certificate of Origin.

Kerjasama Indonesia – Pakistan yang sudah berjalan hingga saat ini diantaranya adalah: a) instalasi pengolahan seafood oleh PT. Delta Pasific Indotuna; b) Pembangunan unit produksi Indofood di Faisalabad; c) MoU antara Lembaga halal Pakistan dan BPJPH, IPB dan University of Agriculture Faisalabad, dan small and medium enterprises Indonesia (SMESCO) dan SMEDA Pakistan.

Kedua belah pihak saling menggali potensi pangan dan pertanian di kedua negara yang belum banyak diperdagangkan. Pakistan memiliki potensi pertanian pada komoditas beras, mangga, dan kapas. Sedangkan Indonesia, selain minyak kelapa sawit, memiliki keunggulan pada produk kopi, rempah-rempah



10. Sosialisasi Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan Pelatihan Izin Edar PSAT



Kegiatan ini merupakan inisiasi dari PT. Lion Super Indo dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha terkait standar keamanan dan mutu pangan, serta tata cara perizinan PSAT, guna memastikan bahwa produk yang dijual di PT. Lion Super Indo telah terjamin keamanan dan mutunya dilaksanakan di Hotel Bidakara pada

tanggal 18 Juni 2025.

Dalam kegiatan ini, Direktorat 3.3 turut memberikan sosialisasi terkait perizinan

PSAT, khususnya tata cara registrasi PSAT-PDUK, yang mencakup penjelasan mengenai persyaratan, pengisian formulir pendaftaran, dan cara mengunggah dokumen melalui OSS. Selain itu, dilakukan juga sesi coaching clinic atau bimbingan langsung agar peserta dapat segera mendaftarkan produknya di OSS pada saat kegiatan berlangsung. PT. Lion Super Indo terus melakukan pemantauan terhadap pelaku UMKM yang telah mulai mendaftarkan produknya dalam kegiatan ini, dan berharap agar seluruh pelaku UMKM dapat segera menyelesaikan proses perizinan PSAT sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Sosialisasi Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan Pelatihan Izin Edar PSAT buat UMKM



Kegiatan ini merupakan sosialisasi kedua yang diselenggarakan oleh PT. Lion Super Indo, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha UMKM mitra Superindo terkait standar keamanan dan mutu pangan, serta praktik akses perizinan PSAT

PDUK yang dilaksanakan di Luxton Hotel Bandung pada tanggal 19 Juni 2025. Dalam kegiatan ini, Direktorat 3.2 memberikan sosialisasi terkait regulasi serta standar keamanan dan mutu PSAT. Dilanjutkan Direktorat 3.3 memberikan sosialisasi terkait perizinan PSAT, khususnya registrasi PSAT-PDUK, yang mencakup penjelasan mengenai regulasi, kewajiban dan sanksi bagi pelaku usaha, serta persyaratan dan tata cara pendaftaran registrasi PDUK melalui OSS. Pada kegiatan ini juga dilakukan sesi coaching clinic atau bimbingan langsung sehingga peserta dapat konsultasi sekaligus melakukan registrasi PDUK untuk produknya melalui aplikasi OSS pada saat kegiatan berlangsung. PT. Lion Super Indo berkomitmen akan melakukan pemantauan terhadap pelaku UMKM yang telah mendaftarkan produknya dalam kegiatan ini, dan berharap agar seluruh pelaku UMKM dapat segera menyelesaikan proses perizinan PSAT sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Monitoring PAS AMAN Pasar Bendungan - Provinsi DIY

Pasar Bendungan merupakan salah satu lokasi PAS AMAN Tahun 2023 di Provinsi DIY dan merupakan pasar tradisional terbesar kedua di Kabupaten Kulon Progo. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa penerapan sanitasi dan higiene di Pasar Bendungan sudah cukup baik, ditunjukkan dengan kondisi



lingkungan pasar yang bersih serta adanya pemisahan antara produk PSAT dan PSAH. Stok dan harga pangan pokok strategis di Pasar Bendungan terpantau dalam kondisi stabil dan tersedia.

Pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui pengambilan sampel pangan segar, yang meliputi: Cabai rawit merah, cabai hijau keriting, cabai merah keriting, Bawang merah, brokoli, daun bawang, tomat, pakcoy, kacang panjang, Ikan dan daging ayam. Sampel yang diambil diuji menggunakan rapid test kit untuk mendeteksi cemaran residu pestisida dan formalin. Seluruh sampel menunjukkan hasil negatif, yang mengindikasikan bahwa PSAT aman untuk dikonsumsi

13. Koordinasi Pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada aplikasi e-PPNS



Koordinasi Pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan pada 24 Juni 2025 di Ruang Rapat Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Lantai 12, Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta.

Tujuan pertemuan adalah menginventarisasi kelengkapan data-data PPNS pada aplikasi e-PPNS yang sedang dikembangkan oleh Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen AHU bahwa PPNS saat ini ada sekitar 1500 orang oleh

karena itu dilakukan pertemuan hari ini untuk menginventarisasi data PPNS yang masih aktif, sudah mutasi ke unit kerja yang bukan penegakan hukum dan KTP berakhir. Aplikasi e-PPNS Presisi yang sedang dikembangkan akan terintegrasi dengan Lembaga Penegak Hukum melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi.

Perwakilan Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa saat ini terdapat PPNS bidang pangan sebanyak 30 orang yang aktif (Kartu Tanda Penyidik masih berlaku) dan masing-masing telah memiliki akun e-PPNS.

Sebagai tindak lanjut permintaan data personil PPNS bidang pangan dan data Laporan Kejadian dari tahun 2021-2025 maka pada saat pertemuan, perwakilan Bapanas telah memberikan daftar personil PPNS Bidang Pangan ke Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dan menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada Laporan Kejadian.

B. Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan telah terealisasi melalui tiga petunjuk teknis yang disusun sebagai bagian dari upaya pengawasan pangan. Ketiga juknis tersebut meliputi:

1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Keamanan Pangan Segar
2. Pedoman Program Pasar Pangan Segar Aman; dan
3. Pedoman Sertifikasi Prima.

Pada bulan Juni, telah dilaksanakan penyusunan Pedoman Sertifikasi PRIMA bersama dengan OKKP Daerah penerbit Sertifikasi PRIMA, yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman, memperkuat pelaksanaan sertifikasi di daerah, serta memastikan konsistensi dan kesesuaian pedoman dengan kondisi teknis di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi untuk menampung masukan dari OKKP Daerah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pedoman.

C. Sertifikasi dan registrasi

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Perizinan produk atas Sertifikasi dan registrasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penerbitan SPPB PSAT dan Izin Edar PSAT-PL

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan mendapat amanat untuk melayani penerbitan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan, sedangkan Izin edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal importasi yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. SPPB-PSAT merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan izin edar PSAT-PL.

Pada bulan Juni 2025, terdapat total 250 permohonan baru berupa 17 permohonan SPPB-PSAT dan 233 Izin Edar PSAT-PL. Permohonan yang diterbitkan OKPP-P pada bulan Juni sebesar 12 SPPB-PSAT dan 134 Izin Edar PSAT-PL sedangkan yang ditolak atau TMS sebanyak 5 SPPB-PSAT dan 23 Izin Edar PSAT-PL.

Total akumulasi permohonan yang masuk dari Januari 2025 sampai dengan Juni 2025 adalah sebanyak 195 SPPB-PSAT dan 1.611 Izin Edar PSAT-PL. Dari total 1.806 tersebut, sebanyak 1.019 permohonan sudah terbit dan 157 permohonan ditolak. Infografis layanan OKKP-P periode Juni 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut.



2. Audit Lapang SPPB-PSAT

Dalam menerbitkan SPPB-PSAT, salah satu tahapan yang dilakukan oleh Direktorat PPSKMP sebagai verifikator adalah audit lapang. Audit lapang bertujuan untuk melakukan verifikasi penerapan dengan dokumen yang diajukan pelaku usaha serta melakukan penilaian kesesuaian sanitasi higienis sesuai standar yang berlaku. Pada bulan Juni 2025, OKKPP telah melaksanakan audit lapang terhadap 15 pelaku usaha yang menangani PSAT asal importasi dengan hasil sebagai berikut.

Tabel Hasil Audit Lapang SPPB-PSAT bulan Juni 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI AUDIT	TANGGAL AUDIT
1	PT Fresco Natural Anugerah	Kota Batam	3 Jun 2025
2	PT Felixindo Karya Agung	Kota Batam	4 Jun 2025
3	PT Lestari Inti Pangan	Kab. Bogor	5 Jun 2025
4	PT Lancar Sukses Infiniti	Kota Jakarta Utara	5 Jun 2025
5	CV Intani Kemilau Agroniaga	Kota Jakarta Barat	5 Jun 2025
6	PT Prospect Motor	Kota Jakarta Utara	10 Jun 2025
7	PT Total Harvest Cemerlang	Kota Surabaya	11 Jun 2025
8	PT Sinar Unigrain	Kota Surabaya	12 Jun 2025
9	PT Lima Jari Agro Sakti	Kab Serang	17 Jun 2025
10	CV Mutiara Jaya Indonesia	Kota Surabaya	19 Jun 2025
11	CV Citra Sentosa	Kota Surabaya	20 Jun 2025
12	PT Wahana Coldstorage Indonesia	Kota Tangerang	25 Jun 2025
13	PT Ciptapangan Sukses Makmur	Kota Jakarta Barat	26 Jun 2025
14	PT Sentral Integritas Nusantara	Kota Jakarta Utara	26 Jun 2025
15	PT Naga Tani Bersama	Kota Tangerang	28 Jun 2025

Salah satu proses penerbitan SPPB dilaksanakan penilaian melalui rapat komtek bertujuan untuk memberi rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Sanitasi Higienis Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT), sehingga penerbitan melalui audit menjadi lebih obyektif, professional dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan semua auditor dapat memaparkan secara utuh gambaran masing-masing unit usaha yang telah diaudit, dan tim komtek dapat memberikan rekomendasi yang sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan masukan terhadap penilaian proses penerbitan SPPB, pada bulan Juni 2025 telah dilaksanakan Komisi Teknis OKKPP pada 16 Juni 2025 secara hybrid.

Pelaku usaha yang diajukan pada rapat Komtek 16 Juni 2025 berjumlah 6 (enam) pelaku usaha yaitu:

1. CV. Mekar Jaya
2. PT. Senyue Perkasa Indonesia
3. PT. Sahabat Mulia Jaya Lestari
4. PT. Sukses Papi Indo
5. PT. Indofresh
6. CV. Parifar Sejahtera

Penilai atau pakar yang hadir dalam komtek 19 Juni 2025 yaitu: 1) Universitas Gadjah Mada oleh Prof. Dr. Ir. Sri Rahardjo, M.Sc; 2) Institut Teknologi Bandung oleh Prof. Dr. rer.nat. Rahmana Emran Kartasasmita, M.Si; 3) BRIN oleh Dr. Tri Joko Santoso, S.P., M.Si.; 4) BRIN oleh Mulyana Hadipernata, S.T.P, M.Sc., PhD.; dan tim OKKP Pusat.

Berdasarkan hasil pembahasan, Tim Komisi Teknis OKKP-P sepakat untuk merekomendasikan kepada Ketua OKKP-P agar menerbitkan SPPB-PSAT bagi seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Sidang Komisi Teknis pada 16 Juni 2025. Namun, sebelum penerbitan, pelaku usaha harus terlebih dahulu melengkapi perbaikan yang disarankan oleh Komisi Teknis OKKP-P.



D. Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan

Kegiatan monitoring prioritas pada program KRO Pengawasan Dan Pengendalian Produk (QIA) atas Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengawasan SPPG Program MBG dan Monitoring Kegiatan Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN)

Dalam rangka persiapan pelaksanaan World Food Safety Day (WFSO) tahun 2025, maka Badan Pangan Nasional telah menyiapkan serangkaian rencana kegiatan yang mengintegrasikan beberapa kegiatan terkait pengawasan keamanan pangan, baik pada program prioritas nasional dan Badan Pangan Nasional; dalam rangka persiapan kegiatan WFSO tersebut telah

dilaksanakan Pengawasan di SPPG pada kedua yayasan ini menyediakan ± 3500 porsi makanan per hari untuk sekolah PAUD,TK, SD, SMP, dan SMA di Kec. Megamendung Kab. Bogor.

Tim yang terlibat pada kedua SPPG ini meliputi Ketua SPPG, ahli gizi, dan purchasing & accounting serta relawan yang bertugas sebagai stockiest, chef, prepare dan lainnya.



SPPG Yayasan SCP memperoleh bahan baku pangan segar dari Usaha Dagang (UD) yang ditunjuk oleh yayasan dan berada di area Kab. Bogor, sedangkan Yayasan PPP dari koperasi. Dapur SPPG Yayasan SCP dan PPP secara keseluruhan telah memiliki sanitasi hygiene yang cukup baik, serta fasilitas yang memadai seperti ruang penyimpanan khusus, chiller dan freezer.

Semua penjamah makanan di Yayasan SCP dan PPP sudah menerima pelatihan penjamah makanan dari dinkes. Berdasarkan diskusi terdapat keluhan terkait sayur yang kurang beragam krn siswa cenderung makan sayur tertentu dan kurang tertarik pada sayur yg lain sehingga diperlukan alternatif menu dan edukasi kepada siswa sehingga bisa memotivasi siswa untuk makan sayur yg beragam.

2. Penyusunan TOR dan RAB Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026



Rapat diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil Trilateral Meeting Pagu Indikatif Bapanas TA 2026 pada 4 Juni 2025, bahwa sehubungan dengan Pagu Indikatif Badan Pangan Nasional TA 2026 sesuai SPBI sebesar

79,4 M dengan komponen: (a) gaji dan tunjangan dan (b) operasional perkantoran, maka Bapanas dapat mengusulkan tambahan anggaran,

dengan menyampaikan dokumen pendukung berupa KAK dan RAB. Penyusunan KAK dan RAB berbasis RO sesuai template. Untuk RO bersifat PN disesuaikan dengan cascading RPJMN. KAK dilengkapi data dukung yang memperkuat urgensi dan justifikasi pengalokasian kegiatan dan anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada periode bulan Juni Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan DIPA Revisi 7 tanggal 18 Juni 2025 Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pagu Anggaran Sebesar Rp.38.519.972.000.- dimana terdapat blokir sehingga anggaran menjadi Rp.12.333.462.000,-.
2. Realisasi keuangan pada bulan Juni 2025 sebesar Rp. 775.528.435,- (6,29% berdasarkan anggaran DIPA setelah diblokir) atau 2,01% terhadap pagu Dipa Revisi 7 (target Juni sebesar 2,25%);
3. Kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dicapai melalui: koordinasi antar pemangku kepentingan, optimalisasi fungsi pengawasan dan registrasi, sosialisasi dan promosi pangan B2SA.

4.2. Permasalahan

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, adanya efisiensi anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak optimal.

4.3. Rekomendasi

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan ke depan, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan akan melakukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran
2. Menyusun jadwal palang kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program dan anggaran lingkup Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar III DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	690590	BADAN PANGAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.420.758	7.566.752	12.996.051	45.605.385	10.816.596	2.505.905.871	17.992.908	19.496.893	20.994.458	17.807.636	17.992.396	121.672.336	2.801.268.025
		BELANJA PEGAWAI	1.604.118	3.800.668	7.871.807	3.800.668	3.800.668	7.871.807	6.120.671	6.100.671	6.254.666	6.055.433	5.871.705	4.947.592	64.100.476
		BELANJA BARANG	814.235	3.733.011	5.065.919	41.737.412	6.411.737	2.497.681.541	11.623.661	11.430.836	11.837.794	11.560.727	11.963.729	111.593.314	2.725.453.916
		BELANJA MODAL	2.405	33.073	58.325	67.289	604.191	352.522	248.575	1.965.386	2.901.998	191.476	156.963	5.131.430	11.713.633
	125.01.HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	323.838	1.095.081	1.399.641	37.778.527	1.418.525	2.492.561.113	3.180.009	3.316.278	3.108.128	3.082.812	3.146.278	41.832.129	2.592.242.359
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	323.838	1.089.841	1.378.008	37.751.846	1.390.088	2.492.532.679	3.122.630	3.257.309	3.051.343	3.023.964	3.090.498	41.358.315	2.591.370.359
		53 BELANJA MODAL	0	5.240	21.634	26.681	28.437	28.434	57.379	58.968	56.784	58.848	55.780	473.814	872.000
	125.01.HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	0	0	216.940	653.634	690.521	656.502	2.340.806	1.848.872	5.092.661	1.842.805	2.034.003	38.200.258	53.577.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	215.980	650.682	687.849	654.259	2.281.325	1.800.106	2.311.499	1.789.291	2.008.550	34.509.058	46.908.600
		53 BELANJA MODAL	0	0	960	2.951	2.672	2.243	59.480	48.766	2.781.162	53.514	25.453	3.691.199	6.668.400
	125.01.HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	51.117	149.486	468.956	628.019	831.539	867.711	1.340.132	3.050.796	1.421.100	1.582.251	1.380.478	26.748.387	38.519.972
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	51.117	149.209	463.662	623.417	826.881	862.148	1.335.474	1.243.421	1.416.442	1.574.876	1.372.223	26.556.369	36.475.239
		53 BELANJA MODAL	0	277	5.295	4.602	4.657	5.563	4.657	1.807.375	4.657	7.375	8.256	192.019	2.044.733
	125.01.WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.045.803	6.322.185	10.910.513	6.545.185	7.876.011	11.820.545	11.131.962	11.280.948	11.372.570	11.299.768	11.431.637	14.891.562	116.928.694
		51 BELANJA PEGAWAI	1.804.118	3.800.668	7.871.807	3.800.668	3.800.668	7.871.807	6.120.671	6.100.671	6.254.666	6.055.433	5.871.705	4.947.592	64.100.476
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	439.280	2.493.961	3.008.269	2.711.466	3.506.918	3.632.456	4.884.232	5.130.000	5.058.509	5.172.596	5.492.458	9.189.572	50.699.718

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1876-6014-0180-8700

Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		53 BELANJA MODAL	2.405	27.556	30.437	33.054	568.424	316.282	127.059	50.277	59.395	71.739	67.474	774.398	2.128.500

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pangan Nasional

ttd.
Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c)
NIP. 197411272022211000

Lampiran 2. Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Januari Tahun 2025 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

Program, Kegiatan, KRO, RO		Jumlah Pagu		REALISASI s.d Juni 2025			Sisa Anggaran
		DIPA Awal	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
HA.6877 Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		38.519.972.000	12.333.462.000	2.529.318.573	6,57%	20,51%	9.804.143.427
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.243.760.000	679.000.000	155.057.446	12,46%	22,84%	523.942.554
ABR.00 2	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	679.000.000	155.057.446	12,46%	22,84%	523.942.554
AEA	Koordinasi	17.349.130.000	11.628.217.000	4.498.500	0,03%	0,04%	11.623.718.500
AEA.00 1	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7,860,000,000	391.010.000	117.359.491	2.41%	30.01%	273.650.508

Program, Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		REALISASI s.d Juni 2025			Sisa Anggaran
			DIPA Awal	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
AEA.00 2		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.00 0	1.264.060.00 0	420.076.302	9,07%	33,23 %	843.983.698
AEA.00 3		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.00 0	3.844.062.00 0	771.000	0.02%	0,02%	3.843.291.00 0
AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.900.000.00 0	1.129.747.00 0	46.619.345	2,45%	4,13%	1.083.127.65 5
AFA.00 1		NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	600,000,000	46,825,000	46,619,345	7.77%	99.56 %	205,655
AFA.00 2		NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.00 0	276.550.000	34.994.000	3,49%	12,65 %	241.556.000
AFA.00 3		NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	211.400.000	36.340.557	12.11 %	17.19 %	175.059.443
BDG		Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000.000.00 0	1.764.450.00 0	19,111,860	0.96%	1.62%	1,157,483,14 0

Program, Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		REALISASI s.d Juni 2025			Sisa Anggaran
			DIPA Awal	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
BDG.00 1		UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	2,000,000,00 0	1,176,595,00 0	19,111,860	0.96%	1.62%	1,157,483,14 0
PCA		Perizinan Produk	2.500.000.00 0	722.860.000	158.300.784	6.33%	21.90 %	564.559.216
PCA.00 1		Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.00 0	722.860.000	158.300.784	6.33%	21.90 %	564.559.216
PEH		Promosi	3.500.000.00 0	1,075,400,00 0	0	7.40%	24.10 %	816,270,211
PEH.00 1		Promosi Pangan B2SA	3,500,000,00 0	1,075,400,00 0	0	7.40%	24.10 %	816,270,211
QDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.404.489.00 0	1.214.209.00 0	0	0,00%	0,00%	1.214.209.00 0
QDB.00 1		Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	60.100.000	12.490.106	1.38%	20.78 %	47.609.894

Program, Kegiatan, KRO, RO			Jumlah Pagu		REALISASI s.d Juni 2025			Sisa Anggaran
			DIPA Awal	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
QDB.00 2		Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.00 0	707.390.000	116.992.480	7,80%	23,61 %	540.397.520
QDD		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	684.460.000	116,250,000	15,750,920	2.30%	13.55 %	100,499,080
QDD.00 1		Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	684,460,000	116,250,000	15,750,920	2.30%	13.55 %	100,499,080
QIA		Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.998.000.00 0	1.389.630.00 0	330.308.171	11.02 %	23,77 %	1.059.321.82 9
QIA.002		Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.00 0	1.389.630.00 0	330.308.171	11.02 %	23,77 %	1.059.321.82 9
QMA		Data dan Informasi Publik	1.500.000.00 0	356,010,000	10,122,500	0.67%	2.84%	345,887,500
QMA.00 1		Data Situasi Konsumsi Pangan	1,500,000,00 0	356,010,000	10,122,500	0.67%	2.84%	345,887,500

Program, Kegiatan, KRO, RO		Jumlah Pagu		REALISASI s.d Juni 2025			Sisa Anggaran
		DIPA Awal	REVISI	SP2D	% DIPA	% Revisi	
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0,00%	0,00%	2.225.000.000
RAG.00 1	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	2.225.000.000	0	0,00%	0,00%	2.225.000.000